

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
RITEL TRADISIONAL DI KABUPATEN MUKOMUKO DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP PENCAPAIAN SDGs
PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI**

(Tesis)

Oleh :

Alfathan Akbar Artha Ramadhan



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RITEL TRADISIONAL DI KABUPATEN MUKOMUKO DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENCAPAIAN SDGs PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI

Oleh

ALFATHAN AKBAR ARTHA RAMADHAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan ritel tradisional di Kabupaten Mukomuko dan menilai implikasi dari implementasi kebijakan terhadap pencapaian SDGs pilar pembangunan ekonomi. Penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teori George C. Edward dimana efektivitas implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor antara lain : faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi/sikap dan faktor struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan ritel tradisional di Kabupaten Mukomuko tidak efektif. Hal ini berdasarkan adanya beberapa pihak *stakeholder* yang kurang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Kondisi SDM yang tidak terpenuhi secara kuantitas dan kualitas serta sarana prasarana yang tidak lengkap juga ikut menghambat efektivitas implementasi kebijakan. Kemudian, ketidaksesuaian kualifikasi dengan kebutuhan menyebabkan ketidakprofesionalan aparatur dalam mengemban beban kerja, dan SOP tidak berjalan dengan baik disebabkan koordinasi yang kurang maksimal dari DPMPTSP dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dalam meningkatkan kepatuhan syarat legalitas UMKM. Hal ini menyebabkan salah satu indikator pilar pembangunan ekonomi SDGs yakni pertumbuhan WUB realisasinya tidak mencapai target. Berdasarkan hasil temuan, disimpulkan bahwa tidak efektifnya implementasi kebijakan ritel tradisional di Kabupaten Mukomuko berimplikasi negatif terhadap capaian pertumbuhan WUB yang menjadi salah satu indikator capaian SDGs Pilar Pembangunan ekonomi di Kabupaten Mukomuko.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan; Ritel Tradisional; *Sustainable Development Goals*.

ABSTRACT**THE EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTATION OF TRADITIONAL
RETAIL POLICY IN MUKOMUKO DISTRICT AND ITS IMPLICATIONS
FOR THE ACHIEVEMENT OF THE SDGs PILLARS OF ECONOMIC
DEVELOPMENT****By****ALFATHAN AKBAR ARTHA RAMADHAN**

This research aims to analyze the effectiveness of the implementation of traditional retail policies in Mukomuko Regency and assess the implications of policy implementation for achieving the SDGs pillars of economic development. This research was conducted using qualitative research with descriptive methods. Data collection techniques used were observation, interviews and documentation. Researchers use George C. Edward's theory where the effectiveness of policy implementation is influenced by 4 (four) factors, including: communication factors, resource factors, disposition/attitude factors and bureaucratic structure factors. The research results show that the effectiveness of implementing traditional retail policies in Mukomuko Regency is not effective. This is based on the existence of several stakeholders who are irresponsible in carrying out their duties. Human resource conditions that are not met in terms of quantity and quality as well as incomplete infrastructure also hinder the effectiveness of policy implementation. Then, the mismatch between qualifications and needs causes unprofessionalism in the apparatus in carrying out the workload, and SOP do not work well due to less than optimal coordination from the DPMPTSP and the Department of Industry, Trade, Cooperatives and MSMEs in improving compliance with MSME legality requirements. This causes one of the pillar indicators of SDGs economic development, namely WUB growth, to not reach the target. Based on the findings, it is concluded that the ineffective implementation of traditional retail policies in Mukomuko Regency has negative implications for achieving WUB growth which is one of the indicators for achieving the SDGs Pillar of Economic Development in Mukomuko Regency.

Keywords: Policy implementation; Traditional Retail; Sustainable Development Goals.

Judul Tesis : **EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RITEL TRADISIONAL DI KABUPATEN MUKOMUKO DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENCAPAIAN SDGs PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI**

Nama Mahasiswa : **Alfathan Akbar Artha Ramadhan**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2126021005**

Program Studi : **Magister Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. Komisi Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Maulana Mukhlis'.

Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.I.P.
NIP. 19780430 200812 1 001

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Pitojo Budiono'.

Dr. R. Pitojo Budiono, M.Si.
NIP. 19640508 199303 1 004

2. Ketua Program Studi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Feni Rosalia'.

Dr. Feni Rosalia, M.Si.
NIP. 19690219 199403 2 001

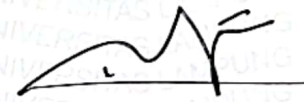
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.I.P.**



Sekretaris : **Dr. R. Pitojo Budiono, M.Si.**



Anggota : **Dr. Syarief Makhya**



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP. 19610807 198703 2 001

3. Direktur Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ica Murnadi, M.Si.

NIP. 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 13 Maret 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS & HAK INTELEKTUAL

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul: “Efektivitas Implementasi Kebijakan Ritel Tradisional di Kabupaten Mukomuko dan Implikasinya Terhadap Pencapaian SDGs Pilar Pembangunan Ekonomi ” adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *plagiarisme*.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya juga bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 13 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,



Alfathan Akbar Artha Ramadhan
NPM. 2126021005

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 10 Januari 1998, sebagai anak Pertama dari tiga bersaudara, dari Bapak Sri Mulyono Herlambang dan Ibu Suci Rohani. Kata Ibu, saya lahir di bidan Ning pada malam hari, ketika masuk pertengahan bulan ramadhan 1419 H.

Jenjang pendidikan formal yang telah penulis tempuh dengan penuh suka dan duka dalam perjuangan antara lain, Sekolah Dasar Negeri (SDN) di SDN 1 Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung dari tahun 2002 sampai lulus di tahun 2008. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di SMPN 13 Bandar Lampung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung dari tahun 2008 sampai lulus di tahun 2011. Selanjutnya penulis melanjutkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di SMAN 7 Bandar Lampung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung dari tahun 2011 dan lulus di tahun 2014.

Puji Syukur kepada Allah Subhanahu WaTa'ala karena pada tahun 2014 penulis tercatat sebagai mahasiswa atau praja Institut Pemerintahan Dalam negeri (IPDN) dan berhasil Lulus Ujian pada tahun 2018 dan Wisuda pada tanggal 27 Juli Tahun 2018. Pada tanggal 1 Agustus 2018 Penulis telah tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil melalui jalur sekolah Kedinasan di Kementerian Dalam Negeri pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Puji Syukur kembali penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu WaTa'ala karena pada tanggal 28 Juni Tahun 2021 Penulis berhasil tercatat sebagai Mahasiswa Pascasarjana pada Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, semoga segala ilmu yang didapat menjadi amal jariah bagi dosen pengajar.

MOTTO

Tidak ada yang namanya kebetulan
Kesempatan datang karena diciptakan
Jadi, jangan terus-terusan berpangku tangan.

Anda tidak harus hebat untuk memulai
Tapi anda harus memulai untuk menjadi orang hebat.

Jangan biarkan kemarin menghentikan hari ini.
(Kata Ayah)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamduillahirabbil'alamiin telah Engkau Ridhai Ya Allah langkah hambaMu,
Sehingga Tesis ini pada akhirnya dapat diselesaikan tepat waktu

Teriring Shalawat Kepada Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam Semoga
Kelak Tesis ini dapat Memberikan Ilmu yang Bermanfaat
dan

Ku Persembahkan Karya Sederhana Ini Kepada:

Kedua Orangtua Saya, Ayahanda Sri Mulyono erlambang dan ibu saya Suci
Rohani yang tidak pernah berhenti menaruh harapan terhadap anak pertamanya
ini. Saya begitu mencintai kalian Selamanya;

Adik Tercinta Agung Putra Herlambang, S.Pd dan Giovanni Bintang Herlambang
yang selalu menemani perjuangan baik dalam keadaan sulit sekalipun;

Untuk Keluarga Besar yang selalu memberikan dukungan, semoga Allah
Subhanahu WaTa'ala senantiasa menyelamatkan kita di Dunia dan Akhirat;

Terimakasih untuk saudara-saudara seperjuangan di Program Pascasarjana
Magister Ilmu Pemerintahan, semoga amal kebaikan yang telah dilakukan
mendapat balasan dari Allah Azza Wa Jalla.

Almamater yang peneliti cintai dan banggakan
Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji senantiasa terucap hanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Senandung Shalawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada manusia yang mengangkat peradaban dari zaman jahiliah menuju zaman terang benderang kaya akan ilmu pengetahuan yang semakin hari semakin berkembang, sebagai juru kunci keselamatan di akhirat kelak, ialah Baginda Besar Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wasallam . Telah terselesaikannya Tesis yang menjadi penutup karya tulis penulis pada Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung dengan Judul “EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RITEL TRADISIONAL DI KABUPATEN MUKOMUKO DAN IMPLIAKSINYA TERHADAP PENCAPAIAN SDGs PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI” bisa terselesaikan tanpa ada hambatan yang berarti.

Bukanlah sebagai pemenuhan prasyarat dalam meraih gelar semata hadirnya karya ini. Lebih jauh dari itu, karya ini merupakan wujud riil penulis dalam melaksanakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu penelitian. Penulis berharap karya ini bisa jadi bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, dan bisa menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya oleh mahasiswa Universitas Lampung.

Manusia adalah makhluk yang heterogen, karenanya manusia selalu membutuhkan orang lain dalam mencapai tujuannya, tanpa bantuan itu manusia akan sulit mencapai apa yang ingin didupatkannya. Dengan ketulusan yang hadir dari hati ini, penulis berharap Allah Subhanahu WaTa'ala dapat membalas semua kebaikan mereka yang telah membantu penulis berjuang menyelesaikan Tesis ini, penulis hanya bisa mengucapkan ribuan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung

2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung
3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Feni Rosalia, M.Si. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.I.P. sebagai Pembimbing Utama yang telah banyak memberi masukan konsep, saran, dan kritikan yang sangat membangun dan berguna dalam penyusunan Tesis ini.
6. Bapak Dr. R. Pitojo Budiono, M.Si sebagai Pembimbing Pendamping yang telah banyak memberi petunjuk penulisan, saran, dan kritikan yang sangat membangun dan berguna dalam penyusunan Tesis ini.
7. Bapak Dr. Syarief Makhya sebagai penguji utama yang telah banyak memberikan petunjuk dalam penyempurnaan penyusunan Tesis ini.
8. Ayah Sri Mulyono Herlambang dan Ibu Suci Rohani tercinta, Beban ini terasa hilang ketika melihat mereka tersenyum.
9. Adik ananda Agung Putra Herlambang, S.Pd dan Giovanni Bintang Herlambang yang mensupport secara mental dan batin.
10. Para Dosen Magister Ilmu Pemerintahan dan Staf/Karyawan di Sekretariat Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang banyak membantu.
11. Untuk seluruh rekan perjuangan Prodi Magister Ilmu Pemerintahan Angkatan 2021 tanpa terkecuali.
12. Untuk Mahasiswa Pembahas Tesis, Mas M. Irawan Adi Hartono, Mba Lidya Ayya Choteni, Nadia Khumairatun Nisa yang telah mau berkontribusi memberikan saran.
13. Untuk Saudara-saudaraku Konsentrasi Manajemen Pemerintahan, Pak Sasmika Dwi Suryanto, Pak Burhibani, Kanda Deni Afero, Mammarella Ramadhan Al Islami yang selalu saling mengingatkan dalam kewajiban sebagai mahasiswa.
14. Bupati Mukomuko yang telah memberikan beasiswa kepada penulis dalam

program tugas belajar ini.

15. Rekan-rekan BKPSDM Kabupaten Mukomuko yang telah memberikan support secara berkesinambungan.
16. Plt. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Mukomuko Nurdiana, SE., M.AP., Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Mukomuko Juni Kurnia Diana, S.AP., seluruh unsur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM serta DPMPTSP yang telah membantu dalam memberikan data pada penelitian ini.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala memberikan yang terbaik bagi kita semua dan baginda besar Nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi wasallam memberikan syafaatnya di yaumul akhir, Aamiin...

Bandar Lampung, Maret 2024

Alfathan Akbar Artha Ramadhan

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
DAFTAR PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Pengertian Efektivitas	11
2.2 Pengertian Implementasi.....	13
2.2.1 Model Implementasi Kebijakan.....	16
2.2.2 Faktor-faktor Penentu Implementasi Kebijakan.....	19
2.3 Strategi Implementasi Kebijakan	24
2.4 Pengertian Implikasi.....	25
2.5 Pengertian Ritel Tradisional.....	26
2.6 Perbedaan Toko Kelontong dan Minimarket	28
2.7 Konsep <i>Sustainable Development</i>	29
2.8 Kerangka Pikir	35
III. METODE PENELITIAN	37
3.1 Tipe Penelitian	37
3.2 Fokus Penelitian	38
3.3 Informan Penelitian.....	40
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.6 Teknik Pengolahan Data	44

3.7 Teknik Analisis Data.....	45
3.8 Teknik Keabsahan Data	46
IV. GAMBARAN UMUM PENELITIAN	48
4.1 Letak Geografis.....	48
4.2 Keadaan Demografis.....	51
4.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	54
4.3.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	54
4.3.2 Fokus Kesejahteraan Sosial.....	59
4.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	59
4.5 Indeks Ketimpangan (Gini Rasio).....	62
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	64
5.1 Implementasi Kebijakan Ritel Tradisional di Kabupaten Mukomuko	64
5.1.1 Faktor Komunikasi.....	64
5.1.1.1 Transmisi.....	64
5.1.1.2 Kejelasan.....	68
5.1.1.3 Konsistensi	69
5.1.2 Faktor Sumber Daya	72
5.1.2.1 Staf	72
5.1.2.2 Wewenang.....	74
5.1.2.3 Informasi	78
5.1.2.3 Fasilitas	83
5.1.3 Faktor Sikap/Disposisi	86
5.1.3.1 Pemilihan Birokrat	86
5.1.3.2 Insentif.....	90
5.1.4 Faktor Struktur Birokrasi	93
5.1.4.1 Standart Operating Procedures (SOP).....	94
5.1.4.2 Fragmentasi.....	97
5.2 Implikasi Implementasi Kebijakan Ritel Tradisional di Kabupaten Mukomuko terhadap pencapaian SDGs Pilar Pembangunan Ekonomi ..	100
5.2.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	100
5.2.2 Proporsi Lapangan Kerja.....	103
5.2.3 Pertumbuhan Kelompok Usaha Baru/Wira usaha Baru (WUB).....	107
5.2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka	110
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	117
6.1 Kesimpulan	117
6.2 Saran.....	118

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Perbedaan Karakteristik Ritel Modern dan Ritel Tradisional	5
Tabel 1.2. Jumlah Sarana Perdagangan di Kabupaten Mukomuko	6
Tabel 3.1. Daftar Informan Penelitian	41
Tabel 4.1. Luas Kecamatan Kabupaten Mukomuko	48
Tabel 4.2. Jumlah Kecamatan dan Desa/kelurahan Kabupaten Mukomuko.....	49
Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kabuapten Mukomuko tahun 2020	52
Tabel 4.4. Indikator Kependudukan Kabupaten Mukomuko tahun 2016-2020	54
Tabel 4.5. PDRB Kabupaten Mukomuko Atas Harga Berlaku dan Harga Konstan menurut Lapangan usaha, Tahun 2016 s.d 2020 (Miliar Rupiah)	55
Tabel 4.6. Laju inflasi Kota Bengkulu 2015-2020 (persen)	57
Tabel 4.7. Pertumbuhan ekonomi, garis kemiskinan, dan penduduk miskin di Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2020.....	58
Tabel 4.8. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu.....	59
Tabel 4.9. Perbedaan Metode Lama dan metode Baru IPM di Indonesia.....	60
Tabel 4.10. Klasifikasi dan Capaian IPM	61
Tabel 4.11. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2020.....	62
Tabel 4.12. Lama Proses Perizinan DPMPTSP Tahun 2023 Kabupaten Mukomuko.....	63
Tabel 5.1. Tingkat Pendidikan Aparatur Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	73
Tabel 5.2. Capaian SDGs Pertumbuhan ekonomi melalui Pertumbuhan UMKM Tahun 2020-2021	102
Tabel 5.3. Persentase Penduduk yang bekerja menurut status pada pekerjaan utama dan jenis kelamin di Kabupaten Mukomuko 2022.....	105
Tabel 5.4. Realisasi Capaian indikator kinerja tenaga kerja Kabupaten Mukomuko tahun 2018-2020	107
Tabel 5.5. Capaian SDGs Pertumbuhan ekonomi melalui UMKM	108

Tabel 5.6. Jumlah pencari kerja yang terdaftar dan terserap lapangan kerja Kabupaten Mukomuko	111
Tabel 5.7. Matriks Efektivitas Implementasi Kebijakan Ritel Tradisional di Kabupaten Mukomuko dan Implikasinya terhadap pencapaian SDGs Pilar Pembangunan Ekonomi	115

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Sistem Kebijakan Publik	16
Gambar 2.2. Faktor Penentu Implementasi Menurut Edwards III	19
Gambar 2.3. Tiga Pilar Pendorong Pembangunan Berkelanjutan.....	32
Gambar 2.4. Kerangka Pikir.....	36
Gambar 4.1. Peta Administratif Kabupaten Mukomuko	50
Gambar 4.2. Pertumbuhan ekonomi Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Mukomuko.....	56
Gambar 4.3. Capaian IPM Kabupaten Mukomuko dan Perbandingan dengan IPM Nasional, 2017-2020.....	61
Gambar 4.4. Gini Ratio Kabupaten Se Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2020 ...	63
Gambar 5.1. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017 s.d 2022 Kabupaten Mukomuko	102
Gambar 5.2. Persentase Angkatan Kerja Menurut Status Bekerja Dan Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten Mukomuko	112

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan publik pada prinsipnya adalah suatu kewenangan yang dibuat oleh pemerintah daerah maupun pusat yang terdiri atas sekelompok individu yang memiliki kekuasaan yang sah dalam sebuah sistem (Ernawati, 2022). Keputusan akhir yang telah dikeluarkan memiliki sifat yang mengikat bagi para pelayan publik untuk melakukan tindakan kedepannya. Kebijakan publik menjadi indikator yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Proses penyelenggaraan pemerintahan memiliki ketergantungan terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan dampak pada objek kebijakan tersebut. Terkadang tak jarang kebijakan publik dilaksanakan tidak berpihak kepada rakyat dan justru menguntungkan beberapa pihak tertentu (Tazkiyannida & Hidayatulloh, 2023). Oleh karena itu, kebijakan publik yang dikeluarkan harus berpihak kepada masyarakat dan secara jelas ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Secara dasar kebijakan publik merupakan rangkaian kegiatan yang secara umum ditelaah, didesain, dirumuskan serta ditetapkan atau diputuskan oleh para pemangku kebijakan (Ichsanniaty, 2023). Sekalipun dalam siklus kebijakan publik telah dilakukan tetapi fakta yang ada di lapangan sering menunjukkan kalau kebijakan tersebut kurang efektif dan efisien sehingga tidak tepat sasaran atau tidak maksimal. Kebijakan publik sebagai suatu proses yang tak jarang dicampuri oleh unsur kepentingan politik oleh pihak tertentu, sehingga terkadang dari perumusan sampai dengan implementasi kebijakan bisa tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pada era modern saat ini, banyak masyarakat yang berkembang secara intelektual dikarenakan tuntutan lingkungan sehingga perkembangan

kemampuan meningkat melalui inovasi-inovasi yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri. Inovasi yang dibuat bertujuan untuk memudahkan dalam mengakses kebutuhan primer maupun sekunder di kalangan masyarakat. Inovasi yang dilakukan tidak terlepas dari adanya peran teknologi yang berkembang semakin pesat, hal ini dimanfaatkan oleh beberapa masyarakat yang memiliki kemampuan atau kompetensi untuk mengembangkan ide-ide yang bisa membuat masyarakat lebih mudah dalam mendapatkan sesuatu.

Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, tentu memerlukan sandang, pangan dan papan dalam bertahan hidup. Pada saat ini tentu berbeda dengan terdahulu, dalam unsur sandang saat ini masyarakat bisa mengakses ke seluruh pelosok negeri hasil dari pada kesenian masyarakat dalam bentuk pakaian. Hal tersebut menunjukkan peran teknologi dan pasar modern yang membantu masyarakat dapat dipandang sangat berperan dalam perkembangan kehidupan. Sama halnya dengan pangan, saat ini pangan atau bisa disebut makanan dan minuman dengan sangat mudah masyarakat mendapatkannya pada lingkungan sekitar, disebabkan beberapa masyarakat membuka bisnis kuliner yang bertujuan menyajikan makanan dan minuman siap hidang. Tentu, hal ini memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Kemudian untuk papan yaitu kebutuhan pokok, masyarakat kebanyakan membelinya dalam lingkup lokal, hal ini menjadi fenomena umum pada setiap wilayah karena masyarakat secara rasional berfikir mencari yang terdekat.

Dalam implementasi kebijakan ritel terdapat dasar hukum yang digunakan sebagai legalitas kebijakan yang menjadi pedoman teknis untuk instansi pemerintah daerah menyelenggarakan kebijakan yaitu adapun regulasi yang secara khusus mengatur tentang ritel adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 tahun 2021 tentang Pedoman dan Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan. Dalam pemenuhan kebutuhan, pemerintah daerah memiliki peran besar untuk memfasilitasi secara keseluruhan di setiap aspek. Hal ini didasarkan pada tugas dan wewenang pemerintah untuk menjaga stabilitas dan perkembangan ekonomi daerah.

Setiap pemerintah daerah mengambil sebuah keputusan melalui kebijakan sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada.

Menurut Wafiroh (2023) keberadaan UMKM pada setiap daerah memberikan dampak yang positif untuk keberlangsungan hidup masyarakat. UMKM dalam dunia ekonomi merujuk kepada usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008. Tujuan dari UMKM untuk memberikan sumbangan signifikan khususnya dalam pembentukan produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja. UMKM dipercaya memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi sehingga dapat menjadi penopang bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kementerian KUKM) yang dilansir pada laman ekon.go.id, pada tahun 2021 jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto sebesar 61,07 persen atau Rp. 8.573,89 Triliun. UMKM mampu menyerap 97 persen dari total angkatan kerja dan mampu menghimpun hingga 60,4 persen dari total investasi di Indonesia.

Berdasarkan data di atas, Indonesia mempunyai potensi basis ekonomi nasional yang kuat karena jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dan daya serap tenaga kerja sangat besar. Akan tetapi Indonesia juga masih memiliki tantangan UMKM ke depan yang harus diatasi oleh *stakeholders* antara lain berkaitan dengan inovasi dan teknologi, literasi digital, produktivitas, legalitas atau perizinan, pembiayaan, branding atau pemasaran sumber daya manusia, standarisasi dan sertifikasi, pemerataan pembinaan, pelatihan dan fasilitasi. Berkaitan dengan tantangan tersebut rendahnya kemampuan SDM menghadapi metode perdagangan dari konvensional *offline* ke *online* bisnis dan memahami teknologi untuk menunjang bisnis agar mampu bersaing tentu diperlukan arahan dan peran daripada pemerintah daerah.

Ritel modern pada dasarnya merupakan pemberdayaan dari ritel tradisional. Format ritel ini muncul dan berkembang seiring perkembangan perekonomian,

teknologi, dan gaya hidup masyarakat yang membuat masyarakat menuntut kenyamanan yang lebih dalam berbelanja. Industri ritel, terus tumbuh pesat, bukan hanya di Indonesia, melainkan juga di Asia. Era ritel modern menjelang *Asean Economic Community* (AEC) 2015 diprediksi akan tumbuh lebih cepat. Ritel tradisional merupakan usaha ritel yang menekankan pada pengelolaan usaha dengan pendekatan konvensional dan tradisional.

Kabupaten Mukomuko adalah salah satu Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Bengkulu. Pada awal tahun 2003 Kabupaten Mukomuko secara resmi menjadi kabupaten dengan disahkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 yakni Kabupaten Bengkulu Utara dimekarkan menjadi Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko. Dilansir pada laman <https://wikipedia.org/> Kabupaten Mukomuko tahun 2021 tercatat memiliki jumlah penduduk sebanyak 190.498 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 43,88 Km². Sebagian besar penduduk Mukomuko ini ialah transmigran yang berawal dari Jawa, Sunda, Minang dan sebagainya. Berdasarkan jumlah tersebut 37,4 persen adalah suku Jawa, 6,3 persen adalah suku Sunda, 5,4 persen adalah suku Minang serta lainnya. Secara batas wilayah Kabupaten Mukomuko berbatasan dengan dua Provinsi yaitu Sumatera Barat dan Jambi.

Penduduk asli Mukomuko bagian utara adalah suku Minangkabau. Secara adat, budaya dan bahasa penduduk asli Mukomuko tidak terlihat seperti bagian dari Provinsi Bengkulu sebagaimana kabupaten-kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Bengkulu. Alih-alih lebih terlihat seperti bagian daripada Provinsi Sumatera Barat, ini disebabkan pada masa lalu Mukomuko termasuk salah satu bagian dari rantau Pesisir Barat suku Minangkabau. Tidak dapat dipungkiri transmigran yang ada di Kabupaten Mukomuko kini tumbuh menjadi sentra ekonomi, pertumbuhan penduduk menjadi sangat cepat dengan adanya program transmigrasi. Saat ini penduduk pendatang suku Jawa di Kabupaten Mukomuko telah banyak berdatangan, bahkan dapat dikatakan menyaingi jumlah penduduk asli Mukomuko.

Berkaitan dengan kepala daerah pemerintahan Kabupaten Mukomuko, semenjak berdirinya Kabupaten Mukomuko hingga saat ini telah dipimpin oleh tiga Kepala Daerah yang berbeda, dan salah satu diantaranya bersuku Jawa. Hal tersebut menggambarkan betapa kuatnya dominasi pengaruh suku Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi dan politik di Kabupaten Mukomuko. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mukomuko dibagi menjadi tiga bagian yaitu, perkebunan, pertanian dan perdagangan. Lokasi Mukomuko sangat strategis, terletak di tengah-tengah jalan lintas dua kota besar yaitu Kota Padang dan Kota Bengkulu.

Berkaitan dengan kebijakan ritel di Kabupaten Mukomuko maka dapat diketahui perbedaan karakteristik antara ritel modern dan ritel tradisional dalam format operasional yang ada di Kabupaten Mukomuko. Adapun Perbedaan Karakteristik yang demikian dapat dijadikan indikator untuk mengetahui keadaan ritel tradisional di Kabupaten Mukomuko secara karakteristik, adapun perbedaan karakteristik sebagai berikut :

Tabel 1.1 Perbedaan Karakteristik Ritel Modern dan Ritel Tradisional

No	Aspek	Ritel Tradisional	Ritel Modern
1.	Histori	Evolusi panjang	Fenomena baru
2.	Fisik	Kurang baik, sebagian baik	Baik dan mewah
3.	Kepemilikan/Kelembagaan	Milik masyarakat/desa, pemda, sedikit swasta	Umumnya perorangan/swasta
4.	Modal	Modal lemah/ subsidi/ swadaya masyarakat/ inpres	Modal kuat/ digerakkan oleh swasta
5.	Konsumen	Golongan menengah ke bawah	Umumnya golongan menengah ke atas
6.	Metode Pembayaran	Ciri dilayani, tawar menawar	Ada ciri swalayan, pasti
7.	Status tanah	Tanah negara, sedikit sekali swasta	Tanah swasta, perorangan
8.	Pembiayaan	Kadang-kadang ada subsidi	Tidak ada subsidi
9.	Pembangunan	Umumnya pembangunan dilakukan oleh	Pembangunan fisik umumnya oleh swasta

		pemda/ desa/ masyarakat	
10.	Pedagang yang masuk	Beragam, masal, dari sektor informal sampai pedagang menengah dan besar	Pemilik modal juga pedagangannya (tunggal) atau beberapa pedagang formal skala menengah dan besar
11.	Peluang masuk/ partisipasi	Bersifat masal (pedagang kecil, menengah dan bahkan besar	Terbatas, umumnya pedagan tunggal dan menengah ke atas
12.	Jaringan	Pasar regional, pasar kota, pasar kawasan	Sistem rantai korporasi nasional atau bahkan terkait dengan modal luar negeri, manajemen tersentralisasi

Sumber : CESS, 1988

Pasar mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Dari yang bersifat tradisional menjadi modern. Perkembangan ini terjadi di kota-kota dunia. Keberadaan pasar modern dewasa ini tidak dapat dibendung seiring dengan perubahan pemikiran dan perilaku konsumsi masyarakat. Namun keberadaannya dikhawatirkan dapat mempengaruhi peran pasar tradisional dalam kehidupan masyarakat. Kendatipun keberadaan pasar tradisional tidak dapat dikesampingkan dalam menopang perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Adapun jumlah sarana perdagangan di kabupaten mukomuko sebagai berikut :

Tabel 1.2 Jumlah Sarana perdagangan di Kabupaten Mukomuko

No	Jenis Sarana Perdagangan	2018	2019	2020
1.	Pasar	35	32	43
2.	Minimarket	24	17	26
3.	Toko/Warung Kelontong	2.261	2.044	2.250
4.	Restoran/Warung Makan	607	677	773
	Jumlah/total	2.927	2770	3092

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko, 2023

Berdasarkan jumlah tabel 1.2 menunjukkan bahwa toko/ warung kelontong yang jumlahnya paling banyak diantara yang lainnya. Oleh karena itu, perlu ada tindak lanjut terkait efektivitas implementasi regulasi secara mendalam dan komprehensif terkait dengan kebijakan yang mengatur toko ritel tradisional.

Sejak berdirinya Kabupaten Mukomuko hingga sekarang Kabupaten Mukomuko menjadi satu-satunya kabupaten di Provinsi Bengkulu yang tidak memberikan izin untuk toko ritel berjaringan modern seperti alfamart dan indomaret beroperasi di wilayah Kabupaten Mukomuko. Apabila dilihat secara geografis Kabupaten Mukomuko termasuk kabupaten yang memiliki luas wilayah terluas di Provinsi Bengkulu dengan luas wilayah mencapai 4.036,70 km² di tahun 2021. Dilansir dari laman <https://radarutara.disway.id/> berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu Kabupaten Mukomuko pada tahun 2020 memiliki Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp. 3.326.056,00, ini menunjukkan Kabupaten Mukomuko mampu bersaing tanpa keberadaan pasar ritel modern di wilayah Provinsi Bengkulu.

Konteks Indonesia dalam hal ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut karena adanya semacam kontradiksi antara tekanan mekanisme pasar yang didorong oleh pemerintah pusat, namun harus berhadapan dengan beberapa pemerintah daerah yang keberatan dengan tekanan tersebut. Kebijakan menghambat atau bahkan menolak sama sekali adanya kemungkinan persaingan bebas di antara pelaku usaha menandakan bahwa kebijakan akan menjadi faktor yang paling penting di atas hal-hal yang lain.

Berdasarkan hasil penelitian Mahereta & Ozi (2020) tentang efektivitas kebijakan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket. Terdapat 2 (dua) poin yang diketahui dan perlu diperhatikan dalam efektivitas kebijakan yaitu penyusunan kebijakan regulasi daerah dan sosialisasi kebijakan. Mulai dari dalam penyusunan regulasi daerah tidak boleh bertentangan dengan tujuan kebijakan pusat. Pemerintah daerah harus mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, selain daripada penyusunan adapun yang harus diperhatikan sebagai indikator implementasi yaitu tersampainya kebijakan kepada masyarakat diantaranya yaitu Sosialisasi.

Penelitian dari Mahardika & Nalar Rizki (2021) menjelaskan bahwa metode kualitatif dianggap relevan untuk melihat permasalahan terhadap implementasi kebijakan. Peraturan Walikota Medan nomor 20 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di kota Medan melalui metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif disimpulkan bahwa pola implementasi kebijakan penataan pasar tradisional dan toko modern di kota Medan menunjukkan lemahnya penggunaan pendekatan administrasi dalam implementasi kebijakan, Sehingga dinas perdagangan selaku leading sektor tidak dapat melakukan tindakan penataan terhadap pasar tradisional dan toko modern di kota Medan.

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan dapat dinilai dari penyusunan kebijakan regulasi daerah dan sosialisasi kebijakan. Melalui metode kualitatif efektivitas implementasi kebijakan dapat digunakan untuk menjawab permasalahan terhadap implementasi kebijakan. Penelitian ini menganalisis efektivitas implementasi kebijakan ritel tradisional di Kabupaten Mukomuko dan implikasinya terhadap pencapaian SDGs Pilar pembangunan ekonomi. Perbedaan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini akan meneliti efektivitas implementasi kebijakan dan implikasinya terhadap pencapaian SDGs pilar pembangunan ekonomi secara eksplisit. Data capaian SDGs akan menjadi parameter dari implikasinya efektivitas implementasi kebijakan ritel tradisional di Kabupaten Mukomuko terhadap pencapaian SDGs pilar pembangunan ekonomi.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk mempersempit ruang lingkup penelitian perlu adanya pembatasan masalah supaya lebih terarahnya pembahasan yang berhasil dan berdaya guna. Adapun batasan masalah yang dibuat yaitu penelitian ini dilakukan di Kabupaten Mukomuko dengan melibatkan sektor pemerintah daerah dan pelaku

ritel tradisional sebagai narasumber dengan menggunakan metode kualitatif, yang akan berfokus pada efektivitas implementasi kebijakan dan ritel tradisional dan implikasinya terhadap pencapaian SDGs pilar pembangunan ekonomi. Adapun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas implementasi kebijakan ritel tradisional di Kabupaten Mukomuko ?
2. Bagaimana implikasi implementasi kebijakan ritel tradisional terhadap pencapaian SDGs pilar pembangunan ekonomi di Kabupaten Mukomuko ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka telah ditentukan tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis strategi kebijakan ritel tradisional di Kabupaten Mukomuko.
2. Untuk menilai implikasi dari implementasi kebijakan ritel tradisional terhadap pencapaian SDGs pilar pembangunan ekonomi di Kabupaten Mukomuko

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian yang telah ditetapkan di atas, maka dapat ditentukan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai efektivitas implementasi kebijakan ritel tradisional di Kabupaten Mukomuko dan implikasinya terhadap pencapaian SDGs pilar pembangunan ekonomi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan dan menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Manfaat Praktis

Memperkaya dan menambah pengetahuan bagi pembaca dalam suatu penelitian khususnya terkait dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Mukomuko dalam kebijakan ritel tradisional.

a) **Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti mengenai kebijakan ritel tradisional dan SDGs pilar pembangunan ekonomi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pembelajaran dan pengalaman dalam penelitian selanjutnya.

b) **Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat bahwa efektivitas kebijakan dan implementasi kebijakan ritel tradisional berimplikasi terhadap pencapaian SDGs pilar pembangunan ekonomi.

c) **Bagi Pemilik Ritel Tradisional**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi para pemilik ritel tradisional mengenai strategi kebijakan ritel tradisional terhadap ritel yang mereka kelola, dan lebih mengenal regulasi tentang usaha ritel modern dan ritel tradisional secara menyeluruh.

d) **Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintah agar lebih bijaksana dalam memutuskan kebijakan terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Efektivitas

Menurut Saxena (dalam Indrawijaya, 2010) mengatakan bahwa “Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, waktu) telah tercapai, makin besar target yang dicapai maka semakin tinggi tingkat efektivitas”. Pada umumnya efektivitas sering dihubungkan dengan efisiensi dalam pencapaian tujuan organisasi. Padahal suatu tujuan atau saran yang telah tercapai sesuai dengan rencana dapat dikatakan efektif, tetapi belum tentu efisien. Walaupun terjadi suatu peningkatan efektivitas dalam suatu organisasi maka belum tentu itu efisien. Jelasnya, jika sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya dapat dikatakan efektif. Jadi bila suatu pekerjaan itu tidak sesuai waktu yang telah ditentukan, maka dapat dikatakan tidak efektif. Efektivitas merupakan gambaran tingkat keberhasilan atau keunggulan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan adanya keterkaitan antara nilai-nilai bervariasi.

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Menurut Effendy (2003) “Efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan”.

Teori-teori dan pandangan tentang efektivitas dikemukakan oleh banyak para ahli, keberagaman pandangan mengenai efektivitas mencerminkan efisiensi efektivitas dalam kegiatan organisasi dan menjelaskan luasnya ruang lingkup efektivitas. Menurut Makmur (2011) “Efektivitas dapat dikaitkan dengan sebagai ketepatan harapan, implementasi dan hasil yang dicapai”. Sumariyadi (2005) mengemukakan :

“Efektivitas dalam kegiatan organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah dicapai, efektivitas pada umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian operatif dan operasional, dengan demikian pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasi sesuai dengan yang ditetapkan. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan sejauh mana seseorang dapat menghasilkan keluaran sesuai dengan apa yang diharapkan ini dapat diartikan apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan direncanakan dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga, dan lain-lain”.

Berdasarkan beberapa kriteria ukuran efektivitas di atas, paling tidak terdapat sejumlah kriteria yang dapat dijadikan ukuran efektivitas dalam pelaksanaan, yaitu produktivitas, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan. Berkaitan dengan kriteria tersebut, menurut Gibson, et al. (1996) dan Steers (1985) :

1. Produksi atau produktivitas, mencerminkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan sejumlah barang dan jasa seperti yang dituntut oleh lingkungan.
2. Mutu/kualitas, produk yang memenuhi harapan pelanggan dan klien untuk kinerja produk dan jasa, dengan ukuran dan penilaian mutu berasal dari pelanggan dan masyarakat
3. Efisiensi diartikan sebagai rasio keluaran dibanding masukan, memfokuskan pada siklus, masukan – proses – keluaran, dan bahkan menekankan pada elemen masukan dan proses
4. Fleksibilitas menyangkut kemampuan organisasi untuk mengalihkan sumber daya dari aktivitas yang satu ke aktivitas yang lain guna menghasilkan produk dan pelayanan yang baru dan berbeda, menanggapi permintaan masyarakat
5. Kepuasan ditujukan pada perasaan masyarakat terhadap pekerjaan mereka dan peran di organisasi serta pertimbangan manfaat yang diterima partisipan, demikian pula oleh pelanggan dan masyarakat.

2.2 Pengertian Implementasi

Pada hakekatnya, implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-undang, namun bisa pula berbentuk perintah atau petunjuk eksekutif atau keputusan badan peradilan. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, teknik bekerja bersama-sama untuk

melaksanakan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2012) mengemukakan pendapat tentang implementasi, yakni: Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang – undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata. Sementara itu, Grindle dalam (Winarno, 2012) juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa: Secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu ikatan yang memudahkan tujuan – tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Selanjutnya, Van Meter dan van Horn (dalam Winarno, 2012), membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan – tindakan yang dilakukan oleh individu – individu pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan – tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan – keputusan kebijakan sebelumnya.

Dengan demikian, implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap saja dari sekian tahap kebijakan publik. Hal ini berarti bahwa implementasi kebijakan hanya merupakan salah satu variabel penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan persoalan – persoalan publik (Winarno, 2012). Ada sisi penting, namun banyak diabaikan adalah sebagian besar ilmuwan dan praktisi kebijakan publik sepakat bahwa implementasi kebijakan publik perlu dimonitor dan dievaluasi daripada dikendalikan.

Upaya untuk memahami implementasi secara lebih baik dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan Purwanto (2012). Pendekatan pertama, memahami implementasi sebagai bagian dari proses atau siklus kebijakan. Implementasi merupakan salah satu tahapan dari serangkaian proses atau siklus kebijakan. Kemudian, Pendekatan kedua, implementasi kebijakan dilihat sebagai suatu studi atau sebagai sebuah bidang kajian. Perspektif ini tidak dapat dilepaskan dari upaya yang dilakukan oleh para ahli untuk memahami problematika implementasi itu sendiri. Implementasi sebagai studi tentu

memiliki berbagai elemen penting, yaitu: subject matter (ontologi), cara memahami obyek yang dipelajari (epistemologi), dan rekomendasi tindakan yang diperlukan (aksiologi).

Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Perluasan aktivitas ini merupakan suatu kegiatan yang begitu kompleks yang dilaksanakan sebagaimana dijelaskan oleh Purwanto. Menurut Purwanto (2012) menyatakan implementasi tidak semudah yang dibayangkan. Implementasi merupakan suatu kegiatan yang begitu kompleks melibatkan banyak faktor dari berbagai kepentingan. Kerumitan bisa bertambah luas ketika kebijakan yang diimplementasikan tidak dirumuskan secara jelas.

Menurut John Wanna (2007) Implementasi yang dimaksudkan diatas memerlukan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap.

Konsep Implementasi pada dasarnya mempunyai hubungan erat dengan kebijakan karena dalam kebijakan terkandung minimal tiga komponen dasar. Komponen dasar tersebut yaitu: tujuan yang hendak dicapai, sasaran yang spesifik, dan cara untuk mencapai sasaran tersebut. Cara mencapai sasaran inilah yang disebut dengan implementasi, yang biasanya diterjemahkan ke dalam program-program aksi dan proyek. Hal ini dikemukakan oleh (Syafri dan Setyoko, 2010).

Menurut Friedrich (dalam Lubis, 2007) mengatakan bahwa, “Kebijakan adalah serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh seorang atau sekelompok orang atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan peluang dimana kebijakan tersebut diusulkan dalam rangka mencapai tujuan tertentu”.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan pada dasarnya adalah serangkaian tindakan yang diuraikan dalam program-program atau prinsip-prinsip untuk mencapai tujuan. Selanjutnya peneliti akan menguraikan mengenai definisi implementasi yang dikemukakan oleh para ahli.

Menurut Anderson (dalam Purwanto dan Sulistyastuti, 2012), “implementasi merupakan pengelolaan hukum (karena kebijakan telah disahkan dalam bentuk hukum) dengan mengerahkan semua sumber daya yang ada agar kebijakan tersebut mampu mencapai atau mewujudkan tujuannya”.

Berdasarkan definisi diatas, implementasi dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan berdasarkan kebijakan tertentu untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan, dan implementasi itu sendiri merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kebijakan, tanpa implementasi, kebijakan yang telah ditetapkan akan sia-sia.

2.2.1 Model Implementasi Kebijakan

Model Implementasi pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk menyederhanakan realitas implementasi kebijakan yang rumit menjadi lebih sederhana yaitu sebagai hubungan sebab-akibat antar keberhasilan implementasi dengan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi keberhasilan implementasi tersebut. Seirama dengan definisi implementasi kebijakan yang beraneka ragam, maka model implementasi dari para ahli juga bermacam-macam.

Ada kebijakan yang dianggap gagal dalam implementasinya karena tidak berhasil dalam mencapai misi atau tujuannya terkait dengan hasil dan manfaat dari program atau kegiatan yang dilakukan. Begitu juga keberhasilan dalam mencapai tujuan harus senantiasa dilakukan sesuai dengan SOP dan juga isi kebijakan yang mengaturnya.



Gambar 2.1
Sistem Kebijakan Publik
 Sumber : W.N. Dunn (2003)

Dye (1992:2) mengartikan kebijakan publik sebagai “*whatever governments choose to do or not to do*”. Kebijakan publik adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. Kartasasmita (1997:142) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah upaya untuk memahami dan mengartikan (1) apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh pemerintah mengenai suatu masalah, (2) apa yang menyebabkan atau yang memengaruhinya, dan (3) apa pengaruh dan dampak dari kebijakan publik tersebut. Berdasarkan pengertian ini, Dye (1978:9) mengemukakan dalam sistem kebijakan terdapat tiga elemen, yaitu (a) kebijakan publik, (b) pelaku kebijakan, dan (c) lingkungan kebijakan. Dunn juga mengemukakan bahwa dalam sistem kebijakan terdapat tiga elemen, yaitu (a) stakeholders kebijakan, (b) kebijakan publik (*policy contents*), dan (c)

lingkungan kebijakan (policy environment). Stakeholders disebut juga sebagai “*policy actors*” atau “*political actors*”.

Pendekatan implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Grindle dikenal dengan “*Implementation as a Political and Administrative Process*”. Menurut Grindle (dalam Subarsono, 2006), keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhirnya (*outcomes*) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Pengukuran keberhasilan tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) hal yaitu:

Prosesnya Kebijakan, apakah pelaksanaan kebijakan telah sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya. Pencapaian tujuan kebijakan impact atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok, tingkat perubahan yang terjadi dan juga penerimaan kelompok sasaran. Selain itu, keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik juga sangat ditentukan oleh tingkat keterlaksanaan kebijakan yang terdiri atas isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*) Isi kebijakan meliputi: (1) *interest affected*, yaitu kepentingan yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, (2) *type of benefits*, yaitu jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan, (3) *extend of change envision*, yaitu seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi sehingga harus mempunyai skala yang jelas, (4) *site of decision making*, yaitu, letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan, (5) program implementer, yaitu implementasi kebijakan atau program yang harus didukung oleh adanya pelaksana yang berkompeten, dan (6) *resources commited*, yaitu, sumber daya yang harus mendukung agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik. Isi implementasi meliputi : (1) *power, interest and strategy of actor involved*, yaitu kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat, (2) *institution an regime characteristic*, yaitu, karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa sebagai lingkungan di mana implementasi kebijakan dijalankan, dan (3) *compliance and responsiveness*, yaitu sejauh mana tingkat kepatuhan dan

respon dari para pelaksana dalam menanggapi implementasi kebijakan yang dilakukan.

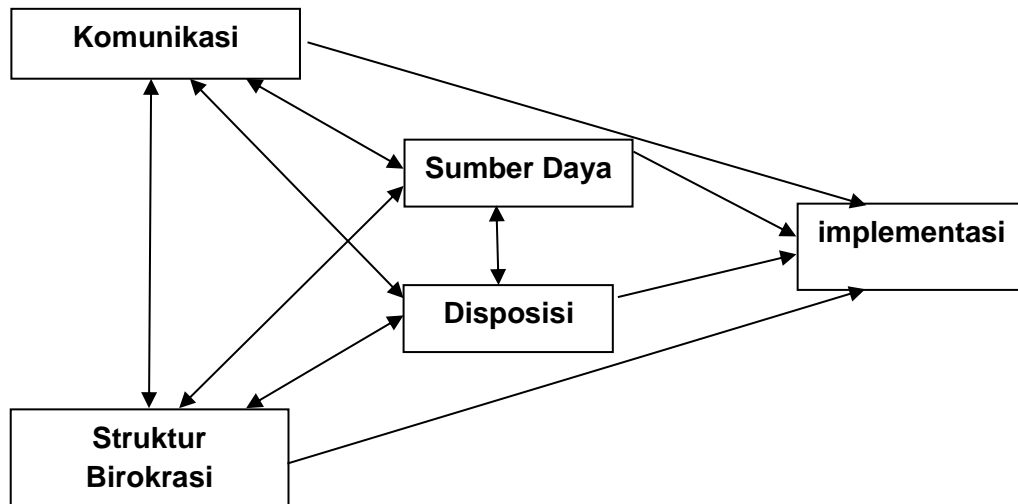
Atas dasar pengertian tersebut dapat ditemukan elemen yang terkandung dalam kebijakan publik sebagaimana apa yang dikemukakan oleh Anderson (dalam Subarsono, 2006) menyebutkan yang antara lain mencakup beberapa hal berikut.

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang dimaksud akan dilakukan.
4. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
5. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

Berdasarkan pengertian dan elemen yang terkandung dalam kebijakan sebagaimana telah disebutkan, maka kebijakan publik dibuat dalam kerangka “untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang diinginkan.” Kebijakan publik ini berkaitan dengan apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekadar apa yang ingin dilakukan (Wahab, 1991:13).

2.2.2 Faktor-faktor penentu implementasi kebijakan

Sehubungan dengan itu model implementasi dikemukakan oleh Edwards III dalam Syafri Wirman (2010:34), menyatakan bahwa: keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh beberapa faktor penting, yaitu (a) komunikasi, (b) sumber daya, (c) sikap Implementor (*dispositions*) atau kecenderungan-kecenderungan, dan (d) struktur birokrasi pelaksana.



Gambar 2.2
Faktor Penentu Implementasi Menurut Edwards III
 Sumber: Edwards III dalam Syafri Wirman (2010)

Berdasarkan model implementasi di atas, diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan sangat banyak. Meter dan Horn (1975) menekankan pada aspek komunikasi, baik secara intern maupun ekstern dalam memahami tujuan dan sasaran kebijakan. Mazmanian dan Sebatier (1983) menyebutkan tiga faktor utama yang sangat mempengaruhi keberhasilan/kegagalan implementasi kebijakan yaitu terkait dengan karakteristik masalah, daya dukung peraturan, dan variabel non peraturan. Menurut George Edwards III dalam Leo Agustino (2008:149-150) bahwa terdapat empat variabel yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu:

1. Faktor Komunikasi

Menurut Edwards, persyaratan pertama bagi efektivitas implementasi kebijakan hanya dengan cara demikian proses komunikasi antar sesamanya akan dapat berjalan dengan baik. Menurut Edward III dalam Agustino (2012:150) terdapat tiga indikator yang dapat dipakai atau digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:

a. Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi). Seperti contohnya, dalam praktek sering timbul hambatan dalam mentransmisikan (menyalurkan) perintah implementasi. Hal itu disebabkan: pertama, perbedaan pendapat antara pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan pengambil kebijakan. Kedua, mendistorsikan informasi. Ketiga, persepsi yang selektif dan ketidakpatuhan para pelaksana memenuhi berbagai persyaratan kebijakan.

b. Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Hal ini penting agar kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan dapat mencapai sasaran yang dikehendaki. Ketidakjelasan petunjuk pelaksana maupun pesan komunikasi yang disampaikan akan menimbulkan interpretasi yang keliru bahkan mungkin bertentangan dengan makna sesungguhnya dari petunjuk dan pesan komunikasi yang pada gilirannya menimbulkan penyimpangan yang fatal dalam implementasi di lapangan.

c. Konsistensi

Konsistensi menyangkut kepastian dan kejelasan perintah yang harus dilaksanakan oleh para pelaksana. Artinya bahwa perintah-perintah yang diterima oleh pelaksana tidak boleh bertentangan satu sama lain. Sehingga tidak membingungkan pelaksana (perintah yang diberikan tidak boleh berubah-ubah). Tidak konsistennya perintah dapat mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang bertentangan dengan maksud sesungguhnya dari suatu implementasi kebijakan.

2. Faktor Sumber daya

Sumber daya yang akan mendukung implementasi kebijakan yang efektif disini menyangkut: (a) staf yang memadai dengan berbagai keahliannya, (b) wewenang, (c) informasi, (d) fasilitas yang diperlukan.

a. Staf

Staf merupakan unsur paling penting dalam melaksanakan kebijakan. Besaran jumlah staf (staf yang banyak) tidak selamanya berdampak positif bagi implementasi kebijakan. Agar suatu kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik maka perlu didukung oleh sejumlah staf yang memiliki kompetensi, keahlian, maupun keterampilan sesuai kebutuhan.

b. Wewenang

Wewenang menyangkut besaran jangkauan tugas yang dapat dilakukan oleh pejabat pembuat kebijakan maupun pelaksana. Oleh karena itu wewenang ini akan berbeda-beda dari suatu program lainnya. Seseorang dapat saja memiliki wewenang yang luas tetapi tidak cukup efektif dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Seorang menteri dapat saja memiliki wewenang yang cukup luas namun tidak cukup efektif untuk implementasi otonomi daerah misalnya, mengingat terbatasnya wewenang efektif, maka perlu kerjasama antara pejabat maupun pelaksana di lapangan. Wewenang hadir dalam berbagai wajah, dari penyediaan fasilitas, memberi bantuan, sampai memaksakan perilaku. Kewenangan ini harus bersifat formal karena merupakan otoritas atau legitimasi tugas.

c. Informasi

Informasi adalah hal penting dalam implementasi suatu kebijakan. Informasi mempunyai dua bentuk. Pertama, informasi tentang

bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. Artinya para pelaksana perlu mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana harus melakukannya. Kedua, data tentang kepatuhan para pelaksana terhadap peraturan pemerintah. Kedua bentuk informasi tersebut penting bagi efisiensi dan kesungguhan para pelaksana dalam melaksanakan tugas masing-masing.

d. Fasilitas

Fasilitas-fasilitas yang dimaksudkan disini menyangkut ketersediaan sarana fisik, misalnya ketersediaan gedung pelatihan, transportasi, Komputer atau laptop, dan printer untuk implementasi kebijakan. Seorang kepala dinas mungkin saja memiliki staf yang memadai, memahami apa dan bagaimana harus melakukan sesuatu dilengkapi berbagai kewenangan tapi tanpa kantor dan perlengkapan lainnya, maka besar kemungkinan akan mengalami kegagalan dalam implementasi kebijakan yang telah dibuat oleh dinas bersangkutan.

3. Faktor Sikap/disposisi

Kecenderungan-kecenderungan merupakan praduga-praduga dari para pelaksana terhadap suatu kebijakan. Jika para pelaksana bersikap lebih baik karena menerima suatu kebijakan, kemungkinan besar mereka akan melaksanakan kebijakan tersebut secara bersungguh-sungguh seperti yang diharapkan pembuat kebijakan. Sebaliknya jika perspektif dan tingkah laku para pelaksana berbeda dengan para pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan mengalami kesulitan.

Disposisi juga menyangkut persepsi, kewenangan, pemahaman, dan komitmen para pelaksana untuk menerapkan suatu kebijakan. Terdapat tiga kemungkinan sikap dari disposisi yaitu menerima, menolak, atau bersikap netral. Agar implementasi kebijakan dapat efektif, maka segenap upaya harus dilakukan

oleh pembuat kebijakan agar isi dan tujuan kebijakan dapat berkesesuaian dengan para implementor melalui pemahaman setiap individu akan arah kebijakan yang harus diperhatikan dalam disposisi ini, yaitu;

- a. Pemilihan birokrat haruslah orang-orang yang memiliki kompetensi, integritas, dan loyalitas terhadap kebijakan yang dijalankan.
- b. Insentif, oleh karena umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka diperlukan manipulasi insentif agar orang dapat bertindak sesuai harapan pembuat kebijakan yaitu dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu sehingga mendorong para pelaksana melaksanakan perintah dengan baik.

4. Faktor Struktur Birokrasi

Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Menurut Edward III dalam Winarno (2012:206), yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi ke arah yang lebih baik, adalah:

1. *Standart Operating Procedures (SOP)*

Adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administratur/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

2. Fragmentasi

Adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktifitas-aktifitas pegawai diantara beberapa unit pegawai.

2.3 Strategi Implementasi Kebijakan

Menurut Wheelen dan Hunger, (2012) Pengertian implementasi strategi adalah tahap mewujudkan dan menerapkan strategi yang telah dibuat dalam bentuk

tindakan melalui serangkaian prosedur, program dan anggaran. Implementasi Strategi adalah jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan perencanaan strategis. Implementasi strategis merupakan proses dimana beberapa strategi dan kebijakan diubah menjadi tindakan melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur. Walaupun implementasi biasanya baru dipertimbangkan setelah strategi dirumuskan, akan tetapi implementasi merupakan kunci suksesnya dari manajemen strategic. Perumusan strategi dan implementasi strategi harus dilihat seperti dua sisi mata uang.

Implementasi adalah pekerjaan yang dilakukan setelah merumuskan strategi. Dengan keterampilan intuitif dan analitis yang baik, motivasi, dan kepemimpinan khusus serta mampu melakukan banyak koordinasi. Implementasi strategi adalah proses di mana manajemen mewujudkan strateginya dalam bentuk program, prosedur dan anggaran. Implementasi strategi juga dapat diartikan sebagai pengembangan strategi dalam bentuk tindakan. Implementasi terkadang lebih sulit karena implementasi membawa sebuah perubahan. banyak faktor-faktor tak terduga yang bisa menjadi hambatan.

Hitt, Ireland, dan Hoskisson, (2015) menekankan bahwa serangkaian tindakan strategis yang disebut formulasi strategi dan implementasi strategi harus disatukan dengan hati-hati jika perusahaan ingin mencapai daya saing strategis dan menghasilkan pendapatan di atas rata-rata. Kesuksesan persaingan terjadi ketika perusahaan menggunakan perangkat dan tindakan implementasi secara konsisten dengan strategi-strategi level-bisnis, level-perusahaan, akuisisi, internasional, dan kerjasama yang sebelumnya dipilih.

Perumusan strategi dan implementasi strategi harus sesuai dengan tujuan strategis dan misi strategis. Tujuan strategis dan misi strategis disusun berdasarkan informasi yang diperoleh dari analisis lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Perusahaan mempelajari lingkungan eksternal dan internal

agar dapat mengidentifikasi peluang-peluang dan ancaman pasarnya dan menentukan bagaimana menggunakan kompetensi-kompetensi intinya dalam usaha mendapatkan hasil strategisnya yang diinginkan. Dengan pengetahuan ini, perusahaan membentuk tujuan-tujuan strategis, misi strategis mensefisikasi, secara tertulis, produk-produk yang ingin diproduksi oleh perusahaan tersebut dan pasar yang ingin dilayani ketika mendayagunakan sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi-kompetensinya.

2.4 Pengertian Implikasi

Menurut Islamy (2003:114-115), implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu.

Menurut Winarno (2002:171-174) Setidaknya ada 5 (lima) dimensi yang harus dibahas dalam memperhitungkan implikasi dari sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi:

1. Pertama, implikasi kebijakan pada masalah-masalah publik dan implikasi kebijakan pada orang-orang yang terlibat.
2. Kedua, kebijakan mungkin mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan.
3. Ketiga, kebijakan mungkin akan mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang.
4. Keempat, evaluasi juga menyangkut unsur yang lain yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik.
5. Kelima, biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.

Menurut Silalahi (2005: 43), implikasi adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan, yang dapat bersifat baik atau

tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijaksanaan tersebut. Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka yang dimaksud dengan implikasi dalam penelitian ini adalah suatu akibat yang terjadi atau ditimbulkan pelaksanaan kebijakan atau program tertentu bagi sasaran pelaksanaan program baik yang bersifat baik atau tidak baik.

2.5 Pengertian Ritel Tradisional

Ritel berasal dari bahasa Prancis *retailier* yang berarti memecah sesuatu. Secara harfiah kata ritel atau retail juga berarti eceran atau perdagangan eceran dan peritel berarti pengecer atau pengusaha perdagangan eceran. Menurut kamus kata retail ditafsirkan sebagai “*selling of goods and or services to the public*”; atau penjualan barang dan jasa kepada khayalak.

Secara mikro bisnis eceran dapat berperan sebagai penghubung untuk memenuhi kebutuhan langsung dari konsumen akhir terhadap produk yang dihasilkan oleh produsen, karena dalam kehidupan sehari-hari jarang masyarakat akan membeli langsung pada produsen. Bisnis eceran sangat berperan penting dalam menjalankan kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat,¹⁴ khususnya dalam hal kesempatan kerja, distribusi barang, pemenuhan kebutuhan konsumen dan mengindikasikan kebutuhan konsumen. Industri ritel memegang peranan yang cukup penting dalam perekonomian suatu negara, terutama berkaitan dengan proses distribusi sebagai macam produk yang dibutuhkan masyarakat. Pengecer mengumpulkan berbagai jenis barang dan jasa berbagai sumber dan menawarkannya kepada para konsumen, jenis-jenis barang yang beragam memungkinkan para konsumen dapat memilih dan membeli berbagai variasi produk dengan jumlah yang mereka inginkan. Empat fungsi yang dijalankan ritel:

- a. Menyediakan beraneka ragam produk barang dan jasa baik dari sisi variasi jenis, merek dan ukuran.
- b. Memecah beberapa ukuran produk menjadi lebih kecil atau paket kecil agar sesuai dengan kebutuhan konsumen.

- c. Menyimpan persediaan sehingga konsumen akan diuntungkan karena terdapat jaminan ketersediaan produk pada saat dibutuhkannya.
- d. Meningkatkan nilai produk dan jasa

Ritel tradisional atau juga dapat disebut dengan pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki dan dikelola oleh pedagang kecil, menengah swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan tidak secara mandiri dan juga dapat melakukan tawar menawar dalam keseharian. Dalam pengelolaan tidak terdapat karyawan namun hanya dengan tenaga diri sendiri, dan tidak menawarkan promo harga.

Kebanyakan masyarakat memiliki usaha ritel, usaha ritel yang dijalankan salah satunya yaitu toko kelontong atau usaha menjual kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Toko kelontong merupakan usaha mikro yang dimiliki secara pribadi dan cara penjualannya bersifat tradisional, karena untuk membeli barang tidak mandiri tetapi dilayani langsung oleh pelayan toko tersebut. Toko kelontong pada umumnya terletak di teras, ruang tamu ataupun garasi. Menyediakan berbagai kebutuhan pokok seperti sembako, minuman, sarana kebersihan rumah tangga, sarana perawatan tubuh, makanan ringan, obat-obatan, dan bumbu yang digunakan

Regulasi pemerintah mengenai bisnis ritel berada dalam arus pemikiran seperti pada umumnya karena cenderung menggunakan pendekatan yang membatasi bisnis ritel hanya pada *in-store retailing*. Termasuk dalam memberikan batasan mengenai ritel tradisional dan ritel modern. Perpres No 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, memberikan batasan pasar tradisional dan toko modern dalam pasal 1 sebagai berikut:

- Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.
- Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan. Batasan Toko Modern ini dipertegas di pasal 3, dalam hal luas lantai penjualan sebagai berikut:
 - a) Minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus meter per segi);
 - b) Supermarket, 400 m² (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter per segi);
 - c) Hypermarket, diatas 5.000 m² (lima ribu meter per segi);
 - d) Department Store, diatas 400 m² (empat ratus meter per segi);
 - e) Perkulakan, diatas 5.000 m² (lima ribu meter per segi).

Batasan pasar tradisional diatas nampak kurang mewakili pengertian ritel tradisional secara utuh. Karena, berbeda dengan batasan toko modern yang terperinci mulai dari bentuk yang terkecil (minimarket) hingga yang terbesar (hypermarket), batasan pasar tradisional hanya menjelaskan adanya tempat yang luas (atau cukup luas) untuk melokalisasi toko, kios, dan petak-petak, sebagai tempat usaha milik para pedagang dan tempat masyarakat membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari.

2.6 Perbedaan Toko Kelontong dengan Minimarket

Perbedaan antara toko kelontong dan minimarket, menyebabkan persaingan. Minimarket memiliki fasilitas pelayan dan toko yang nyaman dimana sangat berbeda dengan toko kelontong. Toko kelontong memiliki fasilitas yang dinilai

kurang nyaman, mulai dari tempat sempit dan tidak berpendingin ruangan. Minimarket memiliki rak barang yang pembeli bisa mengambil barang sesuai keinginan, sedangkan toko kelontong hanya bisa diambil oleh penjual saja. Minimarket memiliki sistem promosi harga dan toko kelontong tidak ada sistem promosi tersebut. Perbedaan juga dapat dilihat dari jumlah persediaan barang yang ada. Minimarket menyediakan jumlah persediaan barang yang lebih banyak karena tempat yang luas, sedangkan toko kelontong jumlah persediaan barang lebih sedikit. Minimarket juga sudah melayani sistem online dimana pembeli bisa melihat promo hingga persediaan barang yang ada, sedangkan toko kelontong masih menggunakan sistem penjualan ditempat tanpa ada pelayanan sistem online. Perbedaan tersebut, cenderung mengancam kelangsungan usaha toko kelontong.

2.7 Konsep *Sustainable Development*

Seperti yang sudah dikatakan di awal, *sustainable development* adalah gagasan bahwa manusia harus hidup dan memenuhi kebutuhan mereka tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Secara khusus, *sustainable development* adalah cara mengorganisir masyarakat agar dapat eksis dalam jangka panjang. Ini berarti mempertimbangkan baik keharusan sekarang dan masa depan, seperti pelestarian lingkungan dan sumber daya alam atau keadilan sosial dan ekonomi. *Sustainability report* adalah hal yang sangat dibutuhkan dalam hal ini.

Keiner (2001) menguraikan definisi pembangunan berkelanjutan sebagai berikut :

“ Pembangunan berkelanjutan berarti memastikan kondisi hidup yang bermartabat berkaitan dengan hak asasi manusia dengan menciptakan dan mempertahankan jangkauan atau alternative akses yang luas dalam merencanakan pola hidup. Prinsip keadilan antara generasi sekarang dan generasi masa depan harus dijadikan pertimbangan dalam penggunaan sumber daya lingkungan, ekonomi dan sosial . Upaya perlindungan komprehensif pada keanekaragaman hayati dan keanekaragaman genetik juga harus dipertimbangkan. “

Dalam pengertian di atas memaparkan bahwa pembangunan yang berdasarkan kelestarian dimana memenuhi kebutuhan saat ini tanpa berdampak terhadap kebutuhan dimasa akan datang.

Sustainable development adalah konsep yang dapat ditafsirkan dalam berbagai cara, tetapi pada intinya *sustainable development* adalah pendekatan pembangunan yang terlihat menyeimbangkan kebutuhan yang berbeda dengan kesadaran akan keterbatasan lingkungan, sosial dan ekonomi yang kita hadapi sebagai masyarakat. *Sustainable development* adalah konsep yang memberikan pendekatan untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang isu-isu yang mempengaruhi semua aspek kehidupan kita. Dengan memasukkan rencana pemberdayaan masyarakat ke dalam perencanaan baru, misalnya, dapat memastikan bahwa penduduk memiliki peluang untuk mengembangkan kapasitas.

Pembangunan yang berkelanjutan atau *sustainable development* memiliki berbagai definisi dalam perkembangannya. Berdasarkan *President's Council on Sustainable Development in the United States as USEPA* (2013), pembangunan yang berkelanjutan merupakan suatu proses perkembangan yang dapat meningkatkan tingkat perekonomian, menjaga kelestarian lingkungan, dan keadaan sosial untuk kebermanfaatan generasi sekarang dan generasi di masa depan. Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah :

- 1). Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
- 2). Keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat.
- 3). Kualitas lingkungan hidup.
- 4). Pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola

Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang menghubungkan antara pembangunan ekonomi, kualitas lingkungan dan kesetaraan sosial. Mohan Munasinghe dalam Rogers, et. al (2008) menguraikan tiga pilar dari pembangunan berkelanjutan yaitu :

- a. Ekonomi, yaitu memaksimalkan pendapatan dengan mempertahankan atau meningkatkan cadangan kapital.
- b. Ekologi, yaitu menjaga dan mempetahankan sistim fisik dan biologis.
- c. Sosial budaya, yaitu menjaga stabilitas dari sistem sosial dan budaya.

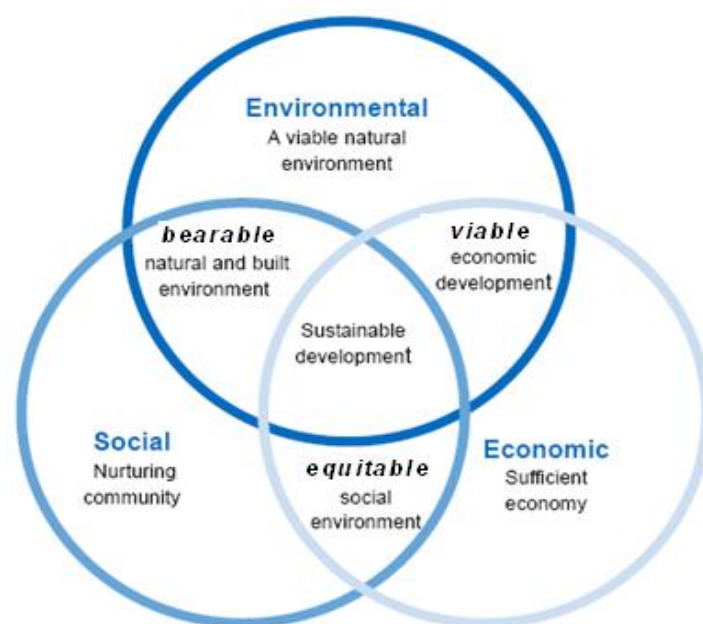
Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya mencakup tiga dimensi yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam dimensi ekonomi terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai antara lain upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memerangi kemiskinan, serta mengubah produksi dan konsumsi ke arah yang seimbang. Sedangkan dimensi sosial berhubungan dengan pemecahan masalah kependudukan, perbaikan pelayanan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, dan lain-lain. Adapun dimensi lingkungan memiliki tujuan-tujuan antara lain upaya pengurangan dan pencegahan terhadap polusi, pengelolaan limbah serta konservasi/preservasi sumber daya alam. Dengan demikian tujuan pembangunan berkelanjutan terfokus pada ketiga dimensi di atas yaitu keberlanjutan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi (*economic growth*), keberlanjutan kesejahteraan sosial yang adil dan merata (*social progress*) Implementasi *Sustainable Development* di Indonesia serta keberlanjutan ekologi dalam tata kehidupan yang serasi dan seimbang (*ecological balance*).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sangat penting bagi suatu negara, khususnya Indonesia. Dari tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut dapat menjadikan Indonesiasebagai negara maju yang mampu berkembang di segala aspek dan juga mampu melaksanakan dan menerapkan konsep ekonomi keberlanjutannya secara baik dan menyeluruh sehingga Indonesia bisa menjadi negara maju yang seutuhnya. Target pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi secara holistik merupakan pilar SDGs yang terakhir.

SDGs merupakan komitmen bersama yang jauh lebih komprehensif dibandingkan dengan MDGs. Penekanan tujuan tidak hanya pada outcome dari pembangunan itu sendiri yang berujung pada peningkatan kesejahteraan, tetapi

juga pada aspek keadilan dan inklusivitas serta cara dalam pencapaian tujuan. SDGs menekankan pada pemenuhan Hak Asasi Manusia, non-diskriminasi, perhatian terhadap kaum marjinal dan difabel, pentingnya partisipasi dan kolaborasi semua pemangku kepentingan pembangunan: pemerintah, dunia usaha, LSM, perguruan tinggi dan masyarakat.

World Summit 2005 menghasilkan konsep tiga pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan yang saling berinteraksi yaitu :



Gambar 2.3
Tiga Pilar Pendorong Pembangunan Berkelanjutan
 Sumber : World Summit (2005)

Ketiga aspek pembangunan berkelanjutan tersebut adalah saling berkontribusi dampak yang positif antara satu dengan yang lainnya. Sehingga apabila dijalankan dan diimplemetasikan dengan baik dalam berbagai aspek kehidupan akan terjadi keterikatan dan ketergantungan yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan dari generasi demi generasi Keterkaitan dan ketergantungan ketiga aspek tersebut ialah sebagai berikut:

- a. aspek ekonomi memberi dampaknya pada aspek sosial (*equitable*) dan lingkungan (*viable*),

- b. aspek sosial memberi dampaknya pada aspek ekonomi (*equitable*) dan lingkungan (*bearable*),
- c. aspek lingkungan memberi dampaknya pada aspek ekonomi (*viable*) dan sosial (*bearable*).

Program internasional yang disepakati oleh PBB untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan antara tahun 2000-2015 adalah *Millennium Development Goals* (MDGs). Selanjutnya pada Konferensi Rio-20 yang dilaksanakan pada 13 – 22 Juni 2012 di Rio Jenairo Brasil disepakati dokumen *The Future We Want* yang menjadi arahan bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di tingkat global, regional, dan nasional. Dokumen memuat kesepakatan pandangan terhadap masa depan yang diharapkan oleh dunia (*common vision*) dan penguatan komitmen untuk menuju pembangunan berkelanjutan (*renewing political commitment*). Dokumen ini memperkuat penerapan Rio Declaration 1992 dan Johannesburg *Plan of Implementation 2002.506*

Berdasarkan laporan ICSU (2015) bahwa *Sustainable Development Goals* mencakup 17 tujuan yaitu :

- 1) Pengentasan kemiskinan di seluruh dunia
- 2) Peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan gizi, serta upaya promosi pertanian berkelanjutan
- 3) Peningkatan promosi hidup sehat dan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Peningkatan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan serta upaya promosi kesempatan belajar seumur hidup.
- 5) Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
- 6) Ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan.
- 7) Tercapainya energi yang handal yang didukung dengan akses yang berkelanjutan serta terjangkau bagi seluruh masyarakat.
- 8) Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kesempatan kerja dan produktifitas serta pekerjaan yang layak untuk semua.
- 9) Infrastruktur yang handal dan mendorong inovasi pada industri yang berkelanjutan
- 10) Ketimpangan antar negara yang semakin kecil.
- 11) Tercapainya kota dan pemukiman yang aman dan berkelanjutan
- 12) Pola produksi dan konsumsi kebutuhan masyarakat yang berkelanjutan.
- 13) Upaya praktis untuk mereduksi dampak perubahan iklim.

- 14) Pelestarian sumber daya kelautan yang mendukung pembangunan berkelanjutan
- 15) Perlindungan ekosistem darat, pengelolaan hutan yang berkelanjutan, pencegahan penggurunan, pencegahan degradasi lahan dan perlindungan keanekaragaman hayati
- 16) Penciptaan masyarakat yang damai untuk pembangunan berkelanjutan, penyediaan akses yang efektif dan akuntabel bagi semua masyarakat.
- 17) Peningkatan sarana dan kemitraan yang mendukung pembangunan berkelanjutan

Perekonomian Kabupaten Mukomuko berkembang seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan perkembangan teknologi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mukomuko menurut data tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 4,33 persen dari tahun sebelumnya 3,35 persen. Peningkatan ini menandakan landasan ekonomi Kabupaten Mukomuko cukup baik, karena pertumbuhan ekonomi digerakkan terutama oleh kategori-kategori usaha yang mempunyai pangsa besar terhadap PDRB Kabupaten Mukomuko. Sektor tersebut antara lain pertanian, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, informasi dan komunikasi. SDGs ke-8 memiliki tujuan untuk berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua. Berdasarkan kewilayahan Kabupaten Mukomuko terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur capaian SDGs ke-8 yaitu, meliputi :

- a. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
- b. Proporsi Lapangan Kerja
- c. Pertumbuhan Kelompok Usaha Baru (KUB) / Wira Usaha Baru (WUB)
- d. Tingkat Pengangguran terbuka

Kebijakan transformasi ekonomi terdiri atas 5 (lima) pilar utama, yaitu (1) Optimalisasi pembangunan infrastruktur, (2) Penguatan implementasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi, (3) Minimalisasi ketergantungan terhadap modal asing jangka pendek, (4) Efisiensi pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta (5) Konfigurasi Investasi untuk mendukung pertumbuhan. Agar kelima pilar berjalan baik, pemerintah memperkuat koordinasi dan dukungan kebijakan dari seluruh sektor di bidang ekonomi, mulai dari

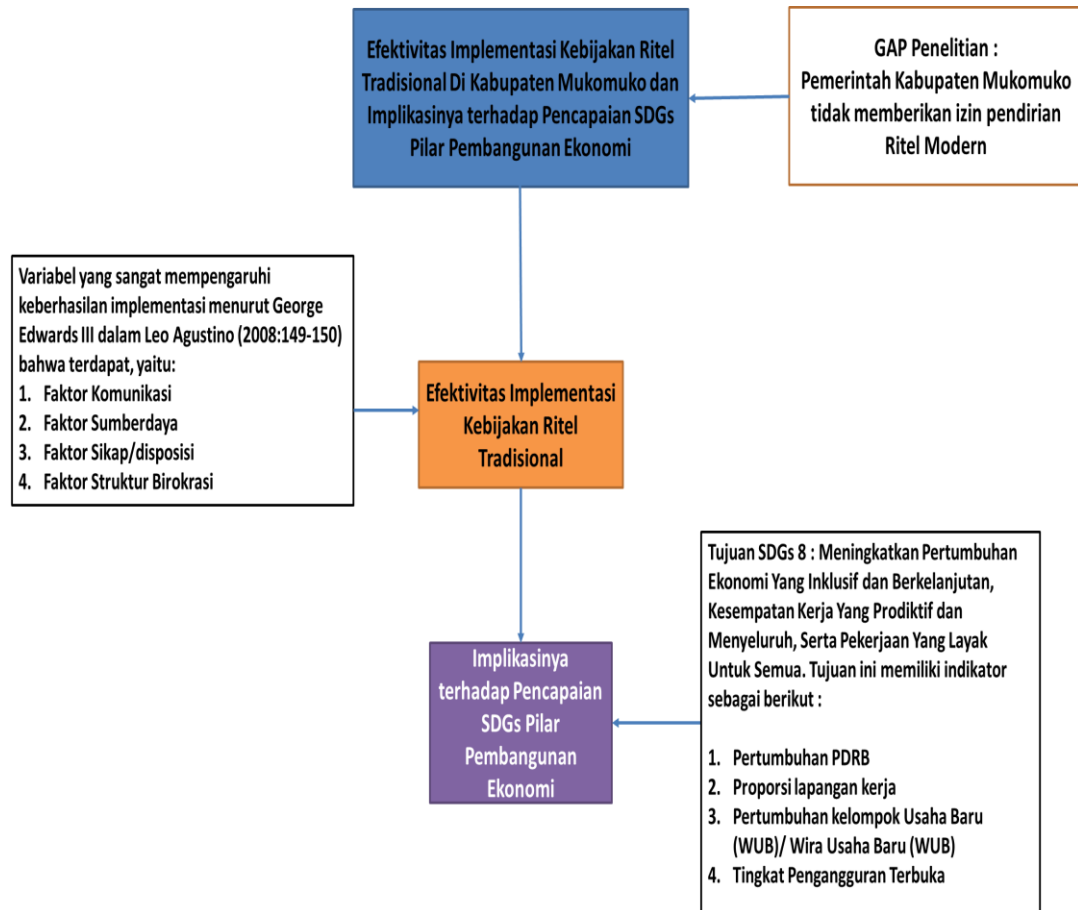
kebijakan fiskal, moneter dan keuangan, serta kebijakan dari kementerian teknis. Pilar kedua adalah memperkuat implementasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi. Kebijakan ini diarahkan untuk mengatasi faktor-faktor ketimpangan melalui pilar kebijakan ekonomi yang berkeadilan. Pembangunan ekonomi SDGs adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang usaha kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan.

2.8 Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran dalam penelitian yang berjudul “Efektivitas Implementasi Kebijakan Ritel Tradisional di Kabupaten Mukomuko Dan Implikasinya Terhadap Pencapaian SDGs Pilar Pembangunan Ekonomi” dengan mengidentifikasi objek penelitian terdahulu. Objek Penelitian dalam penelitian ini adalah Kebijakan Ritel Tradisional dan implikasinya terhadap pencapaian SDGs Pilar pembangunan ekonomi. Penelitian mengkaji efektivitas implementasi kebijakan di Kabupaten Mukomuko dan implikasinya terhadap pencapaian SDGs pilar pembangunan ekonomi.

Penelitian ini membahas proses implementasi kebijakan ritel tradisional di Kabupaten Mukomuko dengan pendekatan implementasi kebijakan publik. Penelitian ini menganalisis efektivitas implementasi Kebijakan ritel tradisional di Kabupaten Mukomuko menggunakan faktor – faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan dengan menggunakan variabel keberhasilan implementasi dari George Edwards III (1980) yang meliputi Faktor komunikasi, faktor sumberdaya, faktor sikap/disposisi, dan faktor struktur birokrasi. Selain menganalisis efektivitas kebijakan penelitian ini menilai implikasi kebijakan ritel tradisional di Kabupaten Mukomuko terhadap pencapaian SDGs Pilar Pembangunan ekonomi berdasarkan SDGs ke-8 yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua. Adapun indikator-indikator SDGs ke-8 yaitu, meliputi Pertumbuhan Produk Domestik

Bruto (PDRB), Proporsi Lapangan Kerja, Pertumbuhan Kelompok Usaha Baru (KUB) / Wira Usaha Baru (WUB) dan tingkat pengangguran terbuka. Berikut bagan kerangka pikir penelitian ini :



Gambar 2.4
Kerangka Pikir

Sumber : Diolah Peneliti (2023)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses mengamati dan mengkaji tentang suatu kebenaran pada tatanan praktis dan teoritis yang digunakan untuk mengatasi masalah pada fokus dan lokus yang diamati oleh peneliti. Dalam kegiatan penelitian ini peneliti akan melaksanakan pengamatan dan pengkajian mengenai efektivitas implementasi kebijakan ritel tradisional di Kabupaten Mukomuko dan implikasinya terhadap pencapaian SDGs pilar pembangunan ekonomi.

Dalam penelitian peneliti ini menggunakan penelitian kualitatif, di mana dalam proses pengumpulan data tidak berhubungan dengan perhitungan angka-angka, dilakukan secara alamiah dan pengambilan data juga dilakukan dengan tatap muka. Berbicara mengenai penelitian kualitatif, Menurut Moleong (2011) menyatakan bahwa:

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan penelitian kualitatif. Istilah “deskriptif” berasal dari istilah bahasa Inggris *to describe* yang berarti memaparkan atau menggambarkan sesuatu hal, misalnya keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan, dan lain-lain. Dengan demikian yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah metode yang dimaksud untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.

Terdapat tiga alasan peneliti memilih metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. *Pertama*, karena fenomena yang diteliti mengenai kebijakan ritel tradisional di kabupaten mukomuko memerlukan data lapangan yang bersifat faktual melalui pengamatan yang bersifat mendalam karena pada dasarnya metode penelitian kualitatif ditujukan untuk penelitian yang bersifat mengamati kasus. *Kedua*, penelitian ini membutuhkan informasi yang dapat diperoleh dengan metode wawancara. Melalui variabel-variabel yang ditemukan dan memungkinkan untuk mendapatkan kesimpulan dari objek yang diteliti. *Ketiga*, penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif untuk menjawab serta menggambarkan bagaimana efektivitas implementasi kebijakan ritel tradisional di kabupaten mukomuko dengan membutuhkan informasi yang didapatkan melalui wawancara, observasi dan dokumen.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian menurut Spradley menyatakan bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Fokus penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam memandu dan mengarahkan jalannya suatu penelitian, fokus penelitian sangat dibutuhkan oleh seorang peneliti agar tidak terjebak oleh melimpahnya volume data yang masuk, luasnya ruang lingkup penelitian, termasuk juga hal-hal yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian. Fokus penelitian memberikan batas dalam studi dan pengumpulan data, sehingga peneliti menjadi fokus memahami masalah dalam penelitiannya (Sugiyono, 2019). Penelitian ini memiliki tiga fokus yang akan di analisis pada bab pembahasan, meliputi:

1. Penelitian ini mengkaji efektivitas implementasi kebijakan ritel tradisional di Kabupaten Mukomuko. Penelitian ini menganalisis efektivitas implementasi kebijakan menggunakan variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi George Edwards III (1980) yaitu :
 - a) Faktor komunikasi, persyaratan pertama bagi efektivitas implementasi kebijakan dengan cara melihat proses komunikasi antar sesamanya,

apabila baik maka akan dapat berjalan dengan baik. Terdapat 3 (tiga) indikator dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi.

- b) Faktor sumberdaya, sumberdaya yang akan mendukung implementasi kebijakan yang efektif disini menyangkut staf yang memadai dengan berbagai keahliannya, wewenang, informasi kebijakan, dan fasilitas.
 - c) Faktor sikap/disposisi, menyangkut sikap para pelaksana dalam menerima suatu kebijakan dan pemahaman setiap individu dalam arah kebijakan, maka yang harus diperhatikan yakni pemilihan birokrat dan insentif.
 - d) Faktor struktur birokrasi, birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan agar melakukan koordinasi dengan baik, sehingga dapat mendongkrak kinerja birokrasi/organisasi ke arah yang lebih baik. Melihat hal demikian, ada 2 (dua) indikator yang digunakan yaitu Standart Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi.
2. Hasil dari penelitian efektivitas implementasi kebijakan ritel tradisional di kabupaten Mukomuko akan dikaitkan dengan implikasinya terhadap pencapaian SDGs pilar pembangunan ekonomi di Kabupaten Mukomuko dengan menggunakan data pencapaian SDGs ke-8 yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua, yang mana ini sebagai parameter implikasi efektivitas implementasi kebijakan terhadap capaian SDGs pilar pembangunan ekonomi. Adapun indikator yang menjadi target-target dalam tercapainya SDGs ke-8, yaitu :
- a) Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PRRB)
 - b) Proporsi Lapangan Kerja
 - c) Pertumbuhan kelompok Usaha Baru (KUB) / Wira Usaha Baru (WUB)
 - d) Tingkat Pengangguran Terbuka

3.3 Informan Penelitian

Dalam penentuan informan penelitian, peneliti menggunakan teknik Sampling Purposive dimana para informan yaitu keterwakilan dari pegawai di perangkat daerah sebagai leading sektor yang terkait pada lingkungan pemerintah Kabupaten Mukomuko yang berkaitan dengan fokus penelitian dan dianggap penelitimampu menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti dan mengerti tentang fokus penelitian.

Menurut Sugiyono (2017:85) menjelaskan bahwa :

Sampling Purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan, atau penelitian tentang kondisi politik di suatu daerah, maka sampel sumber datanya adalah orang-orang yang ahli politik. Sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kualitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi.

Mengutip dari pendapat Spradley (dalam Sugiyono, 2019) bahwa sampel sebagai sumber data atau sebagai informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses kulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya.
- b. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
- c. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimina informasi.
- d. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri.
- e. Mereka yang pada mulanya tergolong cukup asing dengan peneliti sehingga lebih menarik untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.

Berdasarkan pernyataan di atas maka peneliti menetapkan informan penelitian, diantaranya sebagai berikut :

Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah informan	Nama informan
1	2	3	4
1	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Mukomuko	1	Nurdiana, S.E.,M.A.P
2	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mukomuko	1	Juni Kurnia Diana, S.AP
3	Kepala Bidang Perindustrian, Koperasi dan UMKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Mukomuko	1	Denny Haryadi, SE
4	Kepala Bidang Perizinan Dinas DPMPTK Kabupaten Mukomuko	1	Arian Suriyadi, S.AP
5	Pemilik Ritel	3	1. Ian Kasmardi 2. Harizon 3. Leni Gusyanti
Jumlah Total Informan		7 Orang	

Sumber : Diolah Peneliti, 2023

3.4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen Sugiyono (2019). Berdasarkan sumber data di atas, maka klasifikasi sumber-sumber data tersebut ke dalam jenis-jenis data, yaitu:

1. Data Primer Penulis menggunakan data primer yang berasal dari hasil wawancara, baik terstruktur ataupun mendalam (*in depth interview*), serta

observasi langsung oleh peneliti. Saat menetapkan informan, penulis menggunakan teknik stratified sampling dengan proses wawancara. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Wawancara juga dilakukan melalui panduan wawancara. Jadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan beberapa informan.

2. Data Sekunder Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen data Sugiyono (2019). Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, jurnal artikel, serta situs di internet yang bersangkutan dengan penelitian yang dilakukan. Selain data primer, sumber data yang dipakai peneliti yaitu sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan implementasi kebijakan ritel tradisional di kabupaten mukomuko dan efektivitas implementasi kebijakan ritel tradisional di kabupaten Mukomuko dan implikasinya terhadap pencapaian SDGs pilar pembangunan ekonomi.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Nasir dalam Riduan (2013) mengatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan alat-alat ukur yang diperlukan dalam melaksanakan suatu penelitian. Data yang akan dikumpulkan dapat berupa angka-angka, keterangan tertulis, informasi lisan dan beragam fakta yang berpengaruh dengan fokus penelitian yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam proses penelitian adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Dalam Sugiyono (2017:145) menyebutkan “teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar”.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi partisipan (*participant observation*) dengan cara observasi tidak terstruktur. Sugiyono (2017:145) mengatakan bahwa “dalam observasi partisipan, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian”. Kemudian Sugiyono (2017:146) menyebutkan bahwa “observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis, tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati”.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan cara untuk mendapatkan data penelitian dengan mengadakan kontak langsung atau percakapan dengan responden guna untuk memperkuat data sekunder yang diperlukan dalam kegiatan penelitian ini.

Nazir (2013) berpendapat “bahwa Wawancara adalah “Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara)”.

Sugiyono (2017:) menyebutkan “bahwa wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon”.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dulu oleh peneliti dengan teknik wawancara adalah teknik wawancara terbuka dengan maksud agar responden mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula maksud dari wawancara tersebut. Sugiyono (2017) menyebutkan bahwa “wawancara tidak terstruktur atau terbuka, sering digunakan dalam

penelitian pendahuluan atau malahan untuk penelitian yang lebih mendalam tentang responden”. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan, sesuai dengan permasalahan yang terdapat pada latar belakang dan identifikasi masalah. Wawancara bermanfaat untuk melengkapi data yang diperoleh melalui pengamatan karena hasil pengamatan tidak mengungkapkan hal-hal yang dirasakan orang lain. Jadi dengan wawancara dapat diperoleh keterangan yang lebih teliti untuk menguji data dari hasil pengamatan.

2. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2013), “Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya”.

Sugiyono (2017) mengatakan bahwa “dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang”.

Teknik dokumentasi adalah kegiatan mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, buku, surat kabar, notulen, peraturan-peraturan, paper, majalah, agenda dan sebagainya. Teknik dokumentasi ini mempunyai kelebihan yaitu bahan yang diperlukan siap pakai dan apabila terjadi kekeliruan sumber datanya masih tetap atau tidak berubah.

3.6. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperoleh, selanjutnya tahap yang dilakukan adalah mengolah data tersebut. Efendi dkk (dalam Singarimbun, 2008) menjelaskan teknik pengolahan data terdiri dari :

1. Editing Data

Editing data merupakan kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam menjAmien validitasnya serta untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. Dalam proses tersebut, peneliti mengolah data hasil wawancara dengan disesuaikan

pada pertanyaan-pertanyaan pada fokus pedoman wawancara dan menentukan data-data yang diperlukan untuk penulisan. Mengolah kegiatan observasi yaitu peneliti mengumpulkan data-data yang menarik dari hasil pengamatan sehingga dapat ditampilkan dengan baik.

2. Interpretasi data

Pada tahap interpretasi data, data penelitian yang telah dideskripsikan baik melalui narasi maupun tabel selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Interpretasi penulisan juga dilakukan dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat rahasia. Peneliti memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak. Hasil penelitian dijabarkan dengan lengkap pada lampiran. Lampiran juga ditentukan relevan dengan hasil penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian setelah pengumpulan data selesai, sehingga data dapat di pahami yang bertujuan untuk membuat data jadi lebih sistematis dan teratur. Sedarmayanti dan Hidayat (2011) menyebutkan bahwa “analisis data diperlukan agar peneliti dapat mengembangkan kategori dan sebagai perbandingan yang kontras untuk menemukan sesuatu yang mendasar dan memberi gambaran apa adanya”.

Menurut Silalahi (2012) langkah yang dilakukan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Yaitu sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang ada di lapangan ditulis dalam bentuk uraian kemudian dirangkum, dipilih hal- hal yang berkaitan dengan fokus penelitian serta diberi susunan yang lebih sistematis sehingga mudah dikendalikan.

2. Penyajian data

Yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Menyajikan data- data dalam suatu tabel, peta, bagan, struktur terhadap data- data yang diperoleh di lapangan untuk mempermudah dalam memahaminya.

3. Menarik kesimpulan

Berdasarkan fakta- fakta yang telah disajikan, kemudian pengamat berusaha untuk mengambil kesimpulan sebagai hasil pengamatan yang telah dilaksanakan.

3.8 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data adalah ketepatan data yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti Sugiyono (2016). Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan uji kredibilitas melalui triangulasi. Triangulasi dalam uji kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat dan analisis kasus negatif. Agar hasil data dapat dipercaya, peneliti melakukan triangulasi, yaitu berusaha untuk meninjau kebenaran data tertentu dan membandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber lain dengan menggunakan metode yang berlainan dan pada waktu yang berlainan. Untuk memeriksa keabsahan data, peneliti melakukan peninjauan dalam berbagai sumber yaitu dengan mewawancarai lebih dari satu informan yang berasal dari elemen yang berbeda. Selain itu peneliti melakukan pendalaman dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi Sugiyono (2019).

Peneliti tidak hanya berpedoman pada tahapan analisis data diatas dalam analisis data peneliti juga menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi digunakan untuk mengolah data yang diperoleh di lapangan, sehingga didapatkan keabsahan data. Menurut Moleong (2011) “triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”.

Menurut Patton dalam Moleong (2011) ada 4 (empat) macam triangulasi yang dapat digunakan dalam penelitian, yaitu:

1. Triangulasi sumber yaitu pemeriksaan sumber yang memanfaatkan jenis sumber data yang berbeda-beda untuk menggali data yang sejenis.
2. Triangulasi metode yaitu pemeriksaan yang menekankan pada penggunaan metode pengumpulan data yang berbeda dan bahkan jelas untuk diusahakan mengarah pada sumber data yang sama untuk menguji kemantapan informasi.
3. Triangulasi peneliti yaitu hasil penelitian baik diatas atau simpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya bisa diuji validitasnya dari beberapa peneliti yang lain.
4. Triangulasi teori yaitu pemeriksaan data dengan menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji.

Dalam penelitian ini, peneliti lebih memilih untuk menggunakan teknik triangulasi sumber, dimana pemeriksaan sumber yang memanfaatkan jenis sumber data yang berbeda untuk menggali data yang sejenis. Peneliti melakukan triangulasi sumber meliputi sumber data diantaranya sumber informasi, buku, dokumen, dokumentasi foto dan lain-lain.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Letak geografis

Pembentukan Kabupaten Mukomuko berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu, Ibu Kota Kabupaten Mukomuko terletak paling utara di Provinsi Bengkulu dengan jarak 270 KM dari Ibu Kota Provinsi Bengkulu, dengan Ibu kota Kabupaten berkedudukan di Mukomuko yang mempunyai luas 4.146,52 Km² dengan luas per kecamatan sebagai berikut :

Tabel 4.1 Luas Kecamatan di Kabupaten Mukomuko

No.	Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Terhadap Luas Mukomuko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Ipuh	Medan Jaya	195,99	4.73
2	Air Rami	Arga Jaya	116,42	2.81
3	Malin Deman	Talang Arah	861,79	20.78
4	Pondok Suguh	Pondok Kandang	555,11	13.39
5	Sungai Rumbai	Gajah Mati	335,97	8.10
6	Teramang Jaya	Pasar Bantal	412,55	9.95
7	Teras Terunjam	Teras Terunjam	84,60	2.04
8	Penarik	Lubuk Mukti	308,87	7.45
9	Selagan Raya	Sungai Ipuh	440,95	10.63
10	Kota Mukomuko	Pasar Mukomuko	148,07	3.57
11	Air Dikit	Dusun Baru V Koto	87,89	2.12
12	XIV Koto	Lubuk Sanai	69,86	1.68
13	Lubuk Pinang	Lubuk Pinang	69,51	1.68
14	Air Manjuntio	Manjuntio Jaya	65,24	1.57
15	V Koto	Lalang Luas	393,72	9.50
Jumlah			4.146,52	100,00

Sumber: Mukomuko Dalam Angka 2022.

Kabupaten Mukomuko memiliki 15 Kecamatan definitif, 148 Desa defenitif, 1 Desa persiapan dan 3 Kelurahan. Secara rinci jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut :

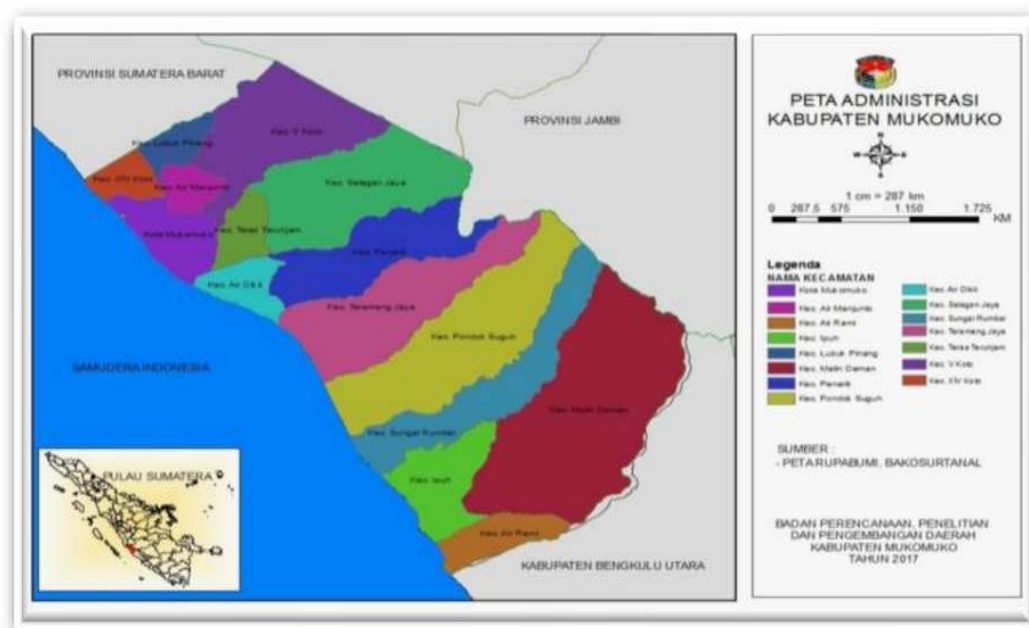
Tabel 4.2 .Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Kabupaten Mukomuko

No	Kecamatan	Desa Definitif	Kelurahan	Desa Persiapan	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Ipuh	16	-	-	16
2	Air Rami	12	-	-	12
3	Malin Deman	7	-	1	8
4	Pondok Sugh	11	-	-	11
5	Sungai Rumbai	9	-	-	9
6	Teramang Jaya	13	-	-	13
7	Teras Terunjam	8	-	-	8
8	Penarik	14	-	-	14
9	Selagan Raya	12	-	-	12
10	Kota Mukomuko	6	3	-	9
11	Air Dikit	7	-	-	7
12	XIV Koto	8	-	-	8
13	Lubuk Pinang	7	-	-	7
14	Air Manjunt	8	-	-	8
15	V Koto	10	-	-	10
JUMLAH		148	3	1	152

Sumber : Mukomuko Dalam Angka 2022, data diolah.

Kabupaten Mukomuko mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat,
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara,
- Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, dan
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.



Sumber: Bapalithbangda Kabupaten Mukomuko, 2010

Gambar 4.1. Peta Administratif Kabupaten

Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Mukomuko, 2023.

Secara astronomis, Kabupaten Mukomuko terletak membujur sejajar dengan Bukit Barisan pada $101^{\circ}01'36''$ – $101^{\circ}51'29,08''$ Bujur Timur dan pada $02^{\circ}16'06''$ – $03^{\circ}07'08''$ Lintang Selatan. Kabupaten Mukomuko mejadi cukup strategis untuk pengembangan wilayah karena (1) terletak di pantai barat Sumatera yang merupakan jalur Daerah Tujuan Wisata (DTW) utama pulau Sumatera, (2) dilintasi oleh Jalan Lintas barat (Jalinbar) Sumatera, dan (3) berada ditengah-tengah antara kota Bengkulu dengan kota Padang atau daerah perbatasan antara wilayah Provinsi Bengkulu dengan Provinsi Sumatera Barat.

Kabupaten Mukomuko mempunyai garis pantai sepanjang lebih kurang 150 Kilometer. Bagian timur berbukit-bukit dengan dataran tinggi yang subur terutama wilayah Kecamatan Malin Deman, Kecamatan Teras Terunjam, Kecamatan Selagan Raya, Kecamatan V Koto, dan Kecamatan Sungai Rumbai, sedangkan bagian barat merupakan dataran rendah yang relatif sempit, memanjang dari utara ke selatan diselingi daerah yang bergelombang.

4.2 Keadaan demografis

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Penduduk Kabupaten Mukomuko pada tahun 2018 berjumlah 189.668 jiwa (Kabupaten Mukomuko Dalam Angka, 2020), tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 193.881 jiwa dan menurun pada tahun 2020 menjadi 190.498 (Mukomuko Dalam Angka. Laju pertumbuhan penduduk merupakan pertumbuhan jumlah penduduk setiap tahun.

Angka laju pertumbuhan penduduk ini didapat dengan cara membagi pertumbuhan jumlah penduduk selama tahun yang bersangkutan dengan jumlah penduduk awal tahun itu. Pada Tahun 2020 Untuk jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Penarik, yaitu sebesar 24.407 jiwa. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Air Dikit, yaitu sebesar 7.112 jiwa.

Piramida penduduk menggambarkan perkembangan penduduk dalam kurun waktu tertentu. Negara atau daerah dengan angka kematian bayi yang rendah dan memiliki usia harapan hidup tinggi, bentuk piramida penduduknya hampir menyerupai kotak, karena mayoritas penduduknya hidup hingga usia tua. Sebaliknya yang memiliki angka kematian bayi tinggi dan usia harapan hidup rendah, piramida penduduknya berbentuk menyerupai genta (lebar di tengah), yang menggambarkan tingginya angka kematian bayi dan tingginya risiko kematian. Pertumbuhan penduduk adalah suatu perubahan populasi yang terjadi sewaktu- waktu dan bisa dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu atau dalam sebuah populasi menggunakan satuan “per waktu unit” untuk pengukuran.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk yaitu :

1. Fertilitas atau kelahiran, yaitu berkaitan dengan peranan kelahiran pada perubahan penduduk. Kelahiran seorang anak akan menambah jumlah penduduk suatu daerah.

2. Mortalitas atau kematian, yaitu salah satu di antara tiga komponen demografi yang dapat mempengaruhi perubahan penduduk. Kematian seorang individu akan mengurangi jumlah penduduk suatu daerah.
3. Migrasi, yaitu perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat tinggal ke tempat tinggal lain.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Mukomuko Tahun 2020

Kecamatan	Penduduk (Ribu)			Laju Pertumbuhan Penduduk Bertahun (%)	
	2018	2019	2020	2018-2019	2019-2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ipuh	19 354	19 714	19 044	1,89	1,51
Air Rami	11 327	11 438	13 115	1,02	2,43
Malin Deman	7 489	7 627	6 862	1,86	0,76
Pondok Suguh	14 211	14 622	13 591	2,93	2,04
Sungai Rumbai	7 533	7 634	9 076	1,40	3,12
Teramang Jaya	12 657	13 012	12 421	2,84	2,23
Teras Terunjam	9 255	9 573	7 977	3,47	1,43
Penarik	25 792	26 475	24 407	2,68	1,74
Selagan Raya	9 144	9 224	10 654	0,93	2,41
Kota Mukomuko	20 122	20 809	18 604	3,44	2,10
Air Dikit	5 927	5 949	7 112	0,42	2,30
XIV Koto	11 773	11 880	13 623	0,95	2,37
Lubuk Pinang	16 094	16 552	14 653	2,88	1,51
Air Manjuntio	9 828	9 918	11 511	0,94	2,49
V Koto	9 162	9 454	7 882	3,23	1,23
Mukomuko	189 668	193 881	190 498	2,25	1,98

Sumber data : Mukomuko Dalam Angka 2022

Perbandingan antara jumlah penduduk usia di bawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun ke atas dengan jumlah penduduk usia 15 – 64 tahun sering juga disebut dengan Rasio Ketergantungan (RK). Keberhasilan pembangunan bidang kependudukan diantaranya dapat tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif, khususnya kelompok umur 0 – 14 tahun yang berarti pula semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Semakin kecil angka beban ketergantungan akan semakin memberikan kesempatan bagi usia produktif (15 – 64 tahun) untuk meningkatkan kualitas dirinya karena semakin kecil beban yang harus ditanggung terhadap penduduk usia tidak produktif.

Bila dilihat komposisi penduduk dari tahun 2016 sampai 2020 cenderung serupa, lebih banyak didominasi pada umur produktif yaitu 15 sampai 64 tahun dengan persentase usia 0 sampai 14 tahun lebih kurang 32 persen, 15 sampai 64 tahun lebih kurang 64 persen, dan 65 tahun keatas lebih kurang 3 persen, sedangkan kelompok penduduk usia muda (0-14 tahun) mengalami peningkatan selama 4 tahun terakhir, meskipun angka peningkatan tidak signifikan. Jumlah penduduk yang didominasi oleh usia produktif tersebut merupakan modal dasar bagi Kabupaten Mukomuko untuk melakukan percepatan pembangunan daerah, yang diringi dengan program-program pembangunan yang berguna untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Dari aspek rasio jenis kelamin (*sex ratio*), secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Hal ini dapat dijelaskan dari rasio jenis kelamin (*sex ratio*) yang nilainya lebih dari 100. Pada tahun 2020, rasio jenis kelamin sebesar 107,20 hal ini menunjukkan bahwa untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 108 penduduk laki-laki.

Tabel 4.4 Indikator Kependudukan Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk (000) Jiwa	181.343	185.499	189.668	193.881	190.498
- Laki-laki	94.333	96.534	98.575	100.826	98.476
- Perempuan	87.010	88.965	91.093	93.055	92.016
Pertumbuhan Penduduk (%)	2,38	2,29	2,25	2,22	1,98
Kepadatan Penduduk (KM ² /Jiwa)	43,73	44,74	45,74	46,76	45,94
Rasio Jenis Kelamin	108,42	108,51	108,21	108,35	107,20

Sumber: Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Mukomuko, 2022

4.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama pembangunan Kabupaten Mukomuko. Tingkat kesejahteraan masyarakat dimaksud dinilai dari tiga fokus yaitu: Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi dan Fokus Kesejahteraan Sosial.

4.3.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Mukomuko, menjelaskan kondisi dan perkembangan masalah Struktur Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Perkapita, Laju Inflasi, dan Kondisi Kemiskinan.

Untuk mengamati perkembangan kinerja perekonomian dan mengevaluasi hasil pembangunan serta tingkat kemakmuran masyarakat disuatu wilayah (Region) biasanya digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) karena PDRB merupakan pengukuran atas nilai tambah yang timbul akibat berbagai aktivitas perekonomian pada suatu daerah.

Pengukuran kinerja ekonomi daerah salah satunya dapat diukur dengan menggunakan nilai PDRB Perkapita. Besaran PDRB Perkapita diperoleh dari nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. Peningkatan PDRB Perkapita dapat dijadikan ukuran untuk menilai dan membandingkan sejauh mana tingkat kesejahteraan penduduk dari tahun ke tahun. Pertumbuhan PDRB Perkapita dari tahun ke tahun merupakan cerminan dari peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menggambarkan penerimaan pendapatan masing-masing masyarakat dalam peran serta mereka pada aktifitas produksi barang/jasa. Nilai PDRB Perkapita menggambarkan besaran pendapatan yang dapat dinikmati oleh setiap penduduk secara rata-rata

PDRB juga menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian disuatu daerah. Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2016-2020, kinerja perekonomian Kabupaten Mukomuko dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, untuk lebih jelasnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.5 PDRB Kabupaten Mukomuko Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan menurut Lapangan Usaha, Tahun 2016 s.d 2020 (Miliar Rupiah)

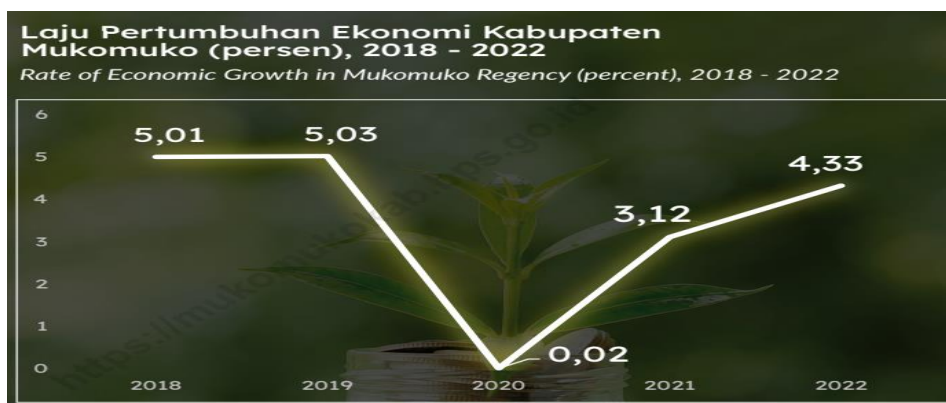
PDRB	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019*	Tahun 2020**
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
Harga Berlaku	3 984	4 335	4 743	5 155	5 265
Harga Konstan	2 866	3 015	3 166	3 325	3 326

Catatan : *) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara

Sumber data : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Mukomuko Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mukomuko merupakan salah satu gambaran kinerja perekonomian daerah Kabupaten Mukomuko, Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mukomuko selama tahun 2016 sampai 2018 mengalami

penurunan, pada tahun 2016 perekonomian Kabupaten Mukomuko tumbuh 5.69 persen, pada tahun 2017 sebesar 5.31 persen, pada tahun 2018 menjadi sebesar 5.01 persen dan kembali naik di tahun 2019 menjadi 5,03 persen. Penurunan pertumbuhan ekonomi tahun 2016 dan 2018 menunjukkan adanya perlambatan ekonomi di Kabupaten Mukomuko terutama di kategoripertanian dan pertambangan. Kemudian pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mukomuko naik sebesar 5,03 Persen. Namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mukomuko mengalami perlambatan menjadi 0,02 persen, hal ini merupakan dampak dari pandemic covid-19. Apabila Disandingkan dengan Pertumbuhan ekonomi Nasional Tahun 2020 pada angka -2.07 persen pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mukomuko berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional.



**Gambar 4.2 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Mukomuko**

Sumber : Mukomuko Dalam Angka 2023

Penghitungan pertumbuhan ekonomi pada dasarnya untuk melihat peningkatan pendapatan agregat suatu wilayah pada suatu waktu tertentu dengan pendekatan nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi atau yang lebih dikenal dengan istilah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Metode pendekatan yang diterapkan dalam PDRB Kabupaten Mukomuko adalah melalui pendekatan produksi. Penghitungan PDRB melalui pendekatan produksi yaitu dengan menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jalan mengurangi biaya antara dari

masing-masing total produksi bruto tiap-tiap kategori. Sehingga kontribusi masing-masing kegiatan ekonomi menjadi faktor tumbuh kembangnya ekonomi. Peningkatan dan penurunan kontribusi satu kategori akan berdampak pada peningkatan dan penurunan kategori ekonomi lainnya.

Untuk tahun 2020, kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi kontributor terbesar dalam perekonomian di Kabupaten Mukomuko (43.64 persen) dengan laju pertumbuhan 1.10 persen, meningkat 0.43 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami pertumbuhan 43.21 persen. Selain kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan, kategori yang mengalami kenaikan pertumbuhan yaitu industri pengolahan (0.02 persen); Pengadaan Listrik dan Gas (0.01 Persen); Transportasi dan Pergudangan (0.23 persen); Informasi dan Komunikasi (0.03 persen); Administrasi Pemerintah, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib (0.02 persen); Jasa Pendidikan (0.01 persen) dan jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (0.01 persen). Sedangkan kategori yang mengalami Penurunan pertumbuhan dari tahun sebelumnya yaitu kategori Pertambangan dan Galian (-0.03 Persen); Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (-0.68 Persen); Real Estat (-0.02 Persen); dan Jasa Perusahaan (-0,01 Persen).

Untuk melihat seberapa besar perkembangan kenaikan harga-harga barang, ukuran secara nasional yang sering digunakan adalah angka inflasi. Angka inflasi yang ditunjukkan dalam persen menunjukkan kenaikan harga-harga barang secara umum pada suatu daerah dan waktu tertentu. Bila melihat angka inflasi Kota Bengkulu yang digunakan sebagai pembandingan tingkat kenaikan harga-harga barang di Mukomuko terlihat bahwa kenaikan harga-harga barang di kota Bengkulu hampir sejalan dengan Mukomuko.

Tabel 4.6 Laju Inflasi Kota Bengkulu 2015 - 2020 (persen)

NO.	TAHUN	PERSEN (%)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
1	2016	5
2	2017	3,56

3	2018	2,35
4	2019	2,91
5	2020	2,59

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko Tahun 2020

Penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Persentase masyarakat miskin di Kabupaten Mukomuko cenderung fluktuatif, persentase masyarakat miskin di Kabupaten Mukomuko pada tahun 2016 sebesar 13,01 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 12,20 persen. Sedangkan pada tahun 2018, persentase masyarakat miskin mengalami penurunan kembali menjadi 11,40 persen dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 11,70 persen dan meningkat Kembali menjadi 11.72 persen, Jika dilihat dari jumlah, masyarakat miskin di Kabupaten Mukomuko cenderung mengalami penurunan, jumlah masyarakat miskin pada tahun 2016 berjumlah 23,45 ribu jiwa dan pada tahun 2017, jumlah masyarakat miskin menurun menjadi 22,51 ribu jiwa. Sedangkan pada tahun 2018, jumlah masyarakat miskin menurun menjadi 21,50 ribu jiwa, pada tahun 2019 terjadi peningkatan menjadi 22,56 ribu jiwa dan meningkat Kembali pada tahun 2020 menjadi 22.04ribu jiwa.

Tabel 4.7 Pertumbuhan Ekonomi, Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2020

NO.	TAHUN	PERTUMBUHAN EKONOMI		PROYEKSI PENDUDUK MISKIN MUKOMUKO (%)	GARIS KEMISKINAN (Rp.)	PENDUDUK MISKIN (%)		
		MUKO MUKO	NASIONAL			JUMLAH (RIBU)	MUKO MUKO	NASIONAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	2016	5.69	5.02	13,45	365.084	23,45	13,01	10.70
2.	2017	5.31	5.07	12,49	388,82	22,51	12,20	10.12
3.	2018	5.01	5.17	12,32	411,795	21,50	11,40	9.66
4.	2019	5.06	5.02	12.18	426.737	22,56	11,70	9.22
5.	2020	0.02	-2.07	12.04	448.127	23.10	11.72	10.19

Sumber data : BPS Mukomuko Tahun 2020, data diolah

Tabel 4.8 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota (Ribu Jiwa)		
	2018	2019	2020
Bengkulu Selatan	29,19	29,31	28,41
Rejang Lebong	42,13	41,58	41,47
Bengkulu Utara	35,78	35,94	36,67
Kaur	23,20	24,02	22,57
Seluma	37,51	39,15	36,23
Mukomuko	21,50	22,56	23,10
Lebong	13,25	13,82	13,97
Kepahiang	19,58	20,18	20,27
Bengkulu Tengah	9,24	9,67	10,79
Kota Bengkulu	70,44	66,07	69,12
Provinsi Bengkulu	301,81	302,30	302,58

Sumber data : BPS Mukomuko Tahun 2021, Data diolah

4.3.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Pada fokus kesejahteraan sosial ini, kita dapat melihat beberapa aspek yang terdiri dari : aspek Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Harapan Hidup (AHH).

4.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan di suatu wilayah digunakan suatu indeks komposit, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). Walaupun indikator tersebut tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, tapi mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan manusia. Kemampuan dasar tersebut adalah umur panjang dan sehat yang diukur dengan Angka Harapan Hidup saat lahir, pengetahuan yang diukur dengan angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, serta standar hidup layak yang diukur dengan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan. Dinamakan indeks komposit dari tiga komponen tersebut : Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan, dan Indeks Pengeluaran.

Pada tahun 2014, mulai diperkenalkan penghitungan IPM dengan menggunakan metode baru. Metode baru ini merupakan penyempurnaan dari metode sebelumnya. Metode baru ini telah menghitung angka IPM tahun 2010-2015 untuk seluruh provinsi di Indonesia hingga ke level kabupaten/kota. Terdapat beberapa perbedaan antara IPM metode lama dan IPM metode baru, antara lain :

Tabel 4.9 Perbedaan Metode Lama dan Metode Baru IPM di Indonesia

NO.	METODE LAMA	METODE BARU
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
1.	Angka Harapan Hidup saat Lahir	Angka Harapan Hidup saat Lahir
2.	Angka Melek Huruf (AMH) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 15+	Harapan Lama Sekolah (HLS) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 25+
3.	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan: 27 Komoditas PPP	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan: 96 Komoditas PPP
4.	Rata-rata Hitung/Aritmatik	Rata-rata Ukur/Geometrik
5.	Reduksi Shortfall (RSF)	Pertumbuhan Aritmatik
6.	Produk Domestik Bruto	Produk Nasional Bruto

Sumber : BPS Kabupaten Mukomuko, 2021.

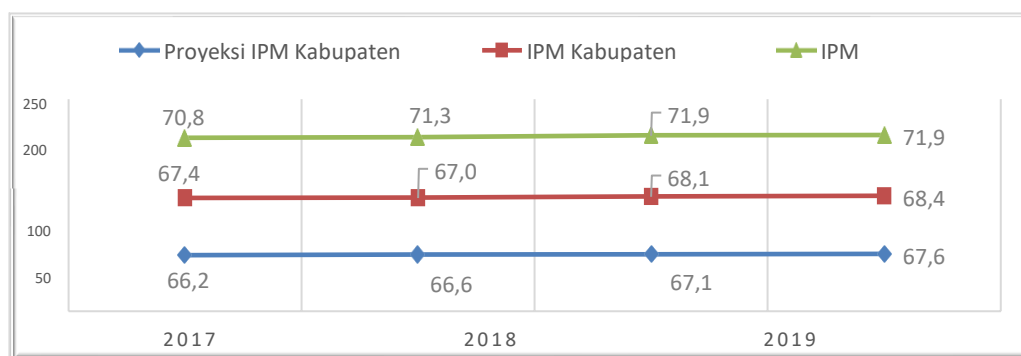
Meningkatnya pembangunan manusia dapat dilihat berdasarkan besaran/skor IPM yang dapat dicapai. Pengklasifikasian pembangunan manusia bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia. Capaian IPM secara garis besar menggambarkan kondisi secara statistik perkembangan pembangunan manusia yang mencerminkan kemajuan daripada suatu daerah itu sendiri yang mana SDM menjadi poin penting dalam perkembangan daerah. Capaian IPM diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu :

Tabel 4.10 Klasifikasi dan Capaian IPM

Nilai IPM	Status Pembangunan Manusia
<60	Rendah
$60 \leq \text{IPM} < 70$	Sedang
$70 \leq \text{IPM} < 80$	Tinggi
≥ 80	Sangat Tinggi

Sumber : BPS Kabupaten Mukomuko, 2021.

Selama tujuh tahun terakhir, kondisi pembangunan manusia di Kabupaten Mukomukomenunjukkan adanya peningkatan sebagaimana ditunjukkan oleh perkembangan IPM di kabupaten ini. Bila pada tahun 2013 IPM Kabupaten Mukomuko tercatat sebesar 64.79, maka pada tahun 2014 meningkat menjadi 65.31. Pada tahun 2015 IPM kembali meningkat menjadi 65.77, tahun 2016 menjadi 66.52, tahun 2017 menjadi 67.07, Tahun 2018 menjadi 67.47. Jika dilihat dari klasifikasi capaian IPM Kabupaten Mukomuko di kategorikan Sedang. Pada tahun 2019 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mukomuko yaitu sebesar 68.12 poin menempati peringkat ke 5 dari 10 kabupaten kota se Provinsi Bengkulu.



Gambar 4.3 Capaian IPM Kabupaten Mukomuko dan Perbandingan dengan IPM Nasional 2017-2020

Sumber : BPS Kabupaten Mukomuko, BPS Provinsi Bengkulu, BPS Pusat, data diolah.

Kemajuan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tersebut. Semakin tinggi nilai IPM, memberi indikasi semakin tingginya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan akan berpengaruh terhadap kemajuan daerah tersebut. Secara umum, pencapaian

IPM Provinsi Bengkulu pada tahun 2019 sebesar 71.21, tapi pada tingkat kabupaten/kota angkanya bervariasi. Pada tahun 2019, IPM tertinggi terjadi di Kota Bengkulu yang mencapai 80.35, sedangkan IPM terendah ada di Kabupaten Seluma sebesar 66.69. Sementara Kabupaten Mukomuko mencapai IPM sebesar 68.12 menempati peringkat kelima setelah Bengkulu Utara (68,8), Rejang Lebong (70.1), dan Bengkulu Selatan (70.27). Namun pada intinya, akselerasi pembangunan di masing-masing kabupaten/kota memiliki tingkat yang berbeda-beda.

Angka IPM Kabupaten Mukomuko dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2018 angka IPM Kabupaten Mukomuko sebesar 67,47, pada tahun 2019 menjadi 68,12, 2020 menjadi 68,45, 2021 menjadi 68.64. Sedangkan pada tahun 2022, angka IPM Kabupaten Mukomuko juga mengalami peningkatan menjadi 69,12.

Tabel 4.11 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mukomuko Tahun 2018-2022

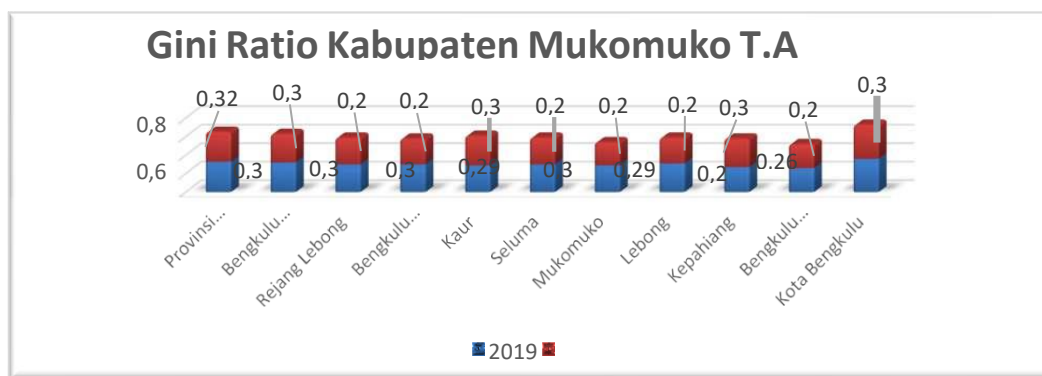
Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
IPM	67,47	68,12	68,45	68,64	69,12

Sumber: Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Mukomuko 2020

4.5 Indeks Ketimpangan (Gini Rasio)

Penilaian kinerja ekonomi daerah tidak hanya dilihat dari sejauh mana tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk, akan tetapi pemerataan distribusi pendapatan daerah harus menjadi fokus utama dalam melihat tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Ketimpangan distribusi pendapatan antar penduduk yang tinggi dapat menimbulkan masalah-masalah sosial di masyarakat, Ketimpangan distribusi pendapatan antar penduduk yang tinggi dapat menimbulkan masalah-masalah sosial di masyarakat. Indeks Gini merupakan Indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh nilai Indeks Gini berkisar 0 hingga 1. ketimpangan berdasarkan gini ratio dibagi menjadi 3 bagian, gini ratio antara

0,5 atau lebih termasuk ke dalam ketimpangan tinggi, nilai gini ratio antara 0,30-0,49 termasuk kategori ketimpangan sedang, dan nilai gini ratio kurang dari 0,30 termasuk ketimpangan rendah, Indeks Gini nilai 0 menunjukan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, Pada Tahun 2019 Gini Ratio Provinsi Bengkulu sebesar 0,329, tahun 2020 sebesar 0,323. Indeks Gini/Gini Ratio Kabupaten Mukomuko pada tahun 2019 sebesar 0,29, Tahun 2020 sebesar 0,25.



Gambar 4.4

Gini Ratio Kabupaten Kota Se Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2020

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko, 2023

Tabel 4.12 Lama Proses Perizinan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja Tahun 2023 Kabupaten Mukomuko

No.	Uraian	Lama Mengurus	Jumlah Persyaratan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	NIB	90 Menit	5
2.	IUMKM	90 Menit	5
3.	IMB	5 Hari	14
4.	SIPD	90 Menit	15

Sumber Data : DPMPPTK, 2023

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini telah menjelaskan tentang efektivitas implementasi kebijakan ritel tradisional di Kabupaten Mukomuko dan implikasinya terhadap pencapaian SDGs pilar pembangunan ekonomi. Efektivitas implementasi kebijakan dapat dilihat melalui Komitmen para pemangku kepentingan, kualifikasi dan kebutuhan sumber daya manusia, sarana-prasarana, dukungan unsur pimpinan, ketaatan dalam menjalankan kebijakan sesuai SOP, dan pemahaman tugas dan fungsi antar sektor. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan ritel tradisional di Kabupaten Mukomuko tidak efektif. Hal ini dikarenakan terdapat temuan yakni pada kegiatan rapat koordinasi kebijakan yang tidak dihadiri oleh seluruh pihak *stakeholder*, Kurangnya personil ASN dan ketidaksesuaian kualifikasi kompetensi pada jabatan, otoritas jabatan yang tidak dimaksimalkan, tidak memiliki gedung pelatihan khusus, serta minimnya aset transportasi, peralatan IT yang dimiliki dalam pelaksanaan kebijakan.

Akibat dari tidak efektifnya implementasi kebijakan ritel tradisional di Kabupaten Mukomuko, memberikan implikasi negatif terhadap proses pencapaian SDGs Pilar pembangunan ekonomi di Kabupaten Mukomuko. Ditemukan berdasarkan laporan SDGs Kabupaten Mukomuko pada indikator Pertumbuhan KUB/WUB tahun 2020-2021 menunjukkan hasil realisasi yang tidak mencapai target, ini menunjukkan salah satu indikator capaian SDGs Pilar Pembangunan ekonomi di Kabupaten Mukomuko belum tercapai. Dengan demikian, implementasi kebijakan ritel tradisional di Kabupaten Mukomuko memiliki implikasi negatif pada pertumbuhan KUB/WUB yang menjadi salah satu indikator dalam pencapaian SDGs pilar pembangunan ekonomi di Kabupaten Mukomuko.

6.2 Saran

Adapun saran atau tindak lanjut yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko, antara lain :

1. Berdasarkan realisasi pada kegiatan rapat koordinasi antar *stakeholders* terkait dengan pembahasan kebijakan ritel tradisional masih ditemukan beberapa pihak yang tidak hadir secara keseluruhan. Oleh karena itu, pihak penyelenggara tim pelaksana kebijakan diharapkan melakukan upaya penguatan komitmen para *stakeholders* dalam pelaksanaan kebijakan.
2. Pada pihak instansi yang terlibat ditemukan masih terdapat kekurangan personil ASN dalam melaksanakan kebijakan, sehingga beban kerja menjadi berlebih dan tidak sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Pimpinan tertinggi tiap instansi diharapkan mengusulkan penambahan jumlah ASN ke pihak kepegawaian daerah yang tentunya sesuai dengan jenjang kompetensi yang dibutuhkan.
3. Pelaksanaan program kebijakan ritel tradisional terdapat kekurangan sarana dan prasarana yang dimiliki, seperti tidak adanya balai pelatihan, terbatasnya peralatan IT, dan minimnya jumlah kendaraan operasional. Para pimpinan *Stakeholders* diharapkan agar segera menambahkan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan melalui pengadaan barang dan jasa di setiap instansi terkait.
4. Kewenangan yang melekat pada jabatan harus dimanfaatkan untuk kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan. Pada penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan ritel tradisional diketahui bahwa masih ada pejabat yang tidak bisa memanfaatkan kewenangan pada jabatan dengan maksimal, sehingga sumber daya yang ada tidak dimanfaatkan dengan baik. Oleh karena itu, diharapkan dalam proses seleksi kompetensi jabatan harus sesuai dengan kemampuan, melalui sistem merit.
5. Berdasarkan laporan SDGs di Kabupaten Mukomuko masih ada indikator yang belum tercapai dalam capaiannya, terutama dalam hal ini pertumbuhan KUB/WUB. Terkait pelaksanaan program kebijakan, Pemerintah

Kabupaten Mukomuko diharapkan dapat meningkatkan kualitas capaian dengan melalui, penguatan Tim Koordinasi Daerah Pelaksanaan Pencapaian SDGs Kabupaten Mukomuko dalam rangka percepatan pencapaian target SDGs, serta melakukan Monitoring dan Evaluasi rutin dalam rangka mengetahui perkembangan pelaporan pencapaian SDGs Kabupaten Mukomuko.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharmisi. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ernawati, A., Wahyudi, J., Astuti, A. D., & Aini, S. Q. (2022). Analisis Kelayakan Pendirian Usaha Pengolahan Limbah Medis untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 13(1), 57–70. <https://doi.org/10.22212/jekp.v13i1.2155>
- Ichsanniaty, P. S., Wiedjanarko, B., & Purnama, W. (2023). *Konsep Perencanaan dalam Perspektif Kebijakan Publik*. 6, 3419–3426.
- Kodrat, David Sukardi. 2009. *Manajemen Strategi, Membangaun Keunggulan Bersaing Era Global di Indonesia Berbasis Kewirausahaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Lubis, M. Solly. (2007). *Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju.
- Mahardika, A., & Nalar Rizki, R. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Tradisional Dan Toko Modern Di Kota Medan. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(10), 1647–1654. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i10.431>
- Mahereta, N., & Ozi, M. F. (2020). Efektivitas Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket Di Kota Yogyakarta. *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 3(1), 56–74. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.84>
- Makmur. (2009). *Teori Manajemen Strategik Dalam Pemerintahan dan Pembangunan*. Jakarta: PT Refika Aditama
- Makmur. (2011). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT Refika Aditama
- Moleong. J. Lexy. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muhammad, Suwarsono. (2012). *Strategi Pemerintahan, Manajemen Organisasi Publik*. Yogyakarta: Erlangga
- Nazir, Mohammad. (2013). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Graha Indonesia.
- Purwanto, E. Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah R. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media.
- Riduwan, (2013). *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sedarmayanti dan Hidayat, Syarifudin. (2011). *Metode Penelitian*. Bandung: Mandar Maju
- Sedarmayanti. (2014). *Manajemen Strategi*. Bandung: PT Refika Aditama
- Silalahi, Amin. (2005). *Strategi Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Surabaya, Batavia Press.
- Silalahi, Ulber. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, Reksohadiprodjo. (2003). *Manajemen Strategi*. Edisi Keempat. BPFE: Yogyakarta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryadi. (2005). *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta : Citra Utama
- Syafri, Wirman.,Setyoko, Israwan. (2010). *Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja*. Sumedang: Alqa Print.
- Tazkiyannida, A., & Hidayatulloh, A. (2023). Determinan Penggelapan Pajak: Sudut Pandang Wajib Pajak Orang Pribadi. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 10(1), 99–109. <https://doi.org/10.30656/jak.v10i1.5449>
- Wafiroh, Hibatin; Lailatul, Ika Nur; Evhin, A. (2023). *JURNAL EKONOMI . MANAJEMEN , BISNIS DAN SOSIAL Analisis Pengaruh Modal Dan Bi Produksi*. 3, 194–201
- Wanna, John. (2007). *Improving implementation : organisational change and project management*. Australia : Congresses (eBook).
- Dunn, William N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Winarno, Budi. (2002). *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta : CAPS